



LAPORAN HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP SATKER DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK 2019

INSPEKTORAT UTAMA

KATA PENGANTAR

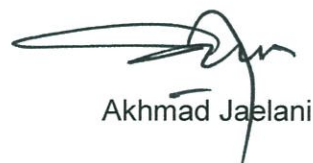
Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan ridho-Nya, Inspektorat Utama telah menyelesaikan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satuan Kerja (Satker) Tahun 2019 di lingkungan Badan Pusat Statistik. Jumlah Satker yang dievaluasi sebanyak 101 Satker, yaitu terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) Satker BPS Provinsi, Pusdiklat, Polstat STIS dan 66 (enam puluh enam) Satker BPS Kabupaten/kota terpilih.

Kewajiban evaluasi atas implementasi SAKIP oleh Inspektorat Utama didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN & RB) Nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2018-2019 diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi dan memberikan masukan kepada Pimpinan Satker yang bersangkutan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban atas pemanfaatan sumber daya yang dikelolanya. Selain itu, melalui Evaluasi sakip ini diharapkan nantinya akan diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja BPS pada masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta membantu penyusunan laporan ini. Semoga Laporan Evaluasi implementasi SAKIP ini bermanfaat untuk perbaikan kegiatan evaluasi implementasi SAKIP di masa mendatang.

Jakarta, 30 September 2019
Inspektur Utama,



Akhmad Jaelani

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kegiatan Evaluasi atas Implementasi SAKIP telah dilaksanakan oleh Inspektorat secara berkala (setahun sekali) dengan terus berupaya dalam peningkatan baik dari sisi kualitas Lembar Kerja Evaluasi, Kertas Kerja Evaluasi, dan Laporan Hasil Evaluasi maupun dari sisi kualitas evaluator. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara melakukan evaluasi dengan mengacu kepada PERMENPAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang “Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”, dan Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2011 tentang “Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal”. Namun untuk memudahkan dan mengurangi resiko GAP penilaian yang tinggi antar Evaluator, Tim koordinator evaluasi atas Implementasi SAKIP Inspektorat Utama selalu berinovasi dalam hal penyusunan kertas kerja evaluasi yang digunakan oleh evaluator baik dalam pelaksanaan *desk evaluation* maupun *field evaluation* dengan tetap mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 12 tahun 2015 tersebut.

Berdasarkan kesepakatan dalam perencanaan evaluasi SAKIP yang dilakukan tahun 2017 bahwa pelaksanaan *field evaluation* atas Implementasi SAKIP Tahun 2018-2019 dilakukan pada 33 (tiga puluh tiga) BPS Provinsi, Pusdiklat, Polstat STIS dan 66 (enam puluh enam) BPS Kabupaten/kota, dengan terbagi dalam 2 Gelombang yaitu Gelombang I dilaksanakan pada tanggal 4 s.d 9 Agustus 2019 dan Gelombang II dilaksanakan pada tanggal 12 s.d 17 Agustus 2019. Kegiatan ini dilakukan dengan mengevaluasi atas beberapa komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja berdasarkan atas pemenuhan dan kualitas dokumen serta implementasi tahun 2019, sedangkan untuk Pelaporan berdasarkan atas pemenuhan dan kualitas serta pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018.

Dalam pelaksanaannya, evaluasi atas implementasi SAKIP atas BPS Provinsi, Pusdiklat, Polstat STIS dan BPS Kabupaten/kota tahun 2018-2019 dilakukan dengan beberapa tahap, antara lain:

1. *Desk Evaluation* untuk 445 satker yang belum dievaluasi secara *field* tahun 2018;
2. Hasil Penilaian *Desk Evaluation* tersebut dijadikan dasar penentuan sampel berdasarkan kriteria yang telah disepakati oleh Pengendali Teknis dengan persetujuan Pimpinan;
3. Tim koordinator evaluasi atas implementasi SAKIP Inspektorat Utama melakukan update LKE, KKE dan LHE yang akan digunakan oleh seluruh evaluator;
4. Untuk mensosialisasikan LKE, KKE dan LHE yang terupdate, me-*refresh* pengetahuan tentang implementasi SAKIP dan persamaan persepsi antar evaluator, Inspektorat Utama melaksanakan Pelatihan di Kantor Sendiri;
5. Evaluator yang akan tugas *field evaluation* melaksanakan *desk evaluation* antara lain evaluasi pemenuhan dan kualitas dokumen Perencanaan dan Pelaporan (dari Website) serta evaluasi Form Rencana Aksi (dari Binagram);
6. Pada Periode pelaksanaan yang telah ditentukan yaitu mulai tanggal 1 s.d 17 Agustus 2019, Masing-masing evaluator melakukan *Field evaluation* dan disupervisi oleh Pengendali Teknis dengan jangka waktu 5-6 hari untuk 3 (tiga) satker yaitu 1 BPS Provinsi, dan 2 BPS Kabupaten/kota;
7. Ketika pelaksanaan evaluasi selesai, Masing-masing tim evaluator diwajibkan untuk mengkomunikasikan Laporan Hasil Evaluasi dengan mengumpulkan seluruh

pegawai dari pimpinan tertinggi hingga staff, guna perbaikan implementasi SAKIP di masa yang akan datang;

8. Hasil *field evaluation* tersebut dikumpulkan dalam kolaborasi dan dipanelisasi antara Tim SAKIP dengan evaluator;
9. Hasil panelisasi tersebut menjadi acuan dalam Penentuan peringkat 1 s.d 33 untuk memberikan *reward* 3 (tiga) satker terbaik pada acara Rateknas;
10. Inspektur Utama menyusun Buku Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Inspektorat Utama tahun 2018 dan menyerahkannya kepada Kemenpan RB.

Berdasarkan hasil penilaian evaluasi implementasi SAKIP tahun 2018-2019 Gelombang I dan II atas 33 (tiga puluh tiga) Satuan Kerja BPS Provinsi, Polstat STIS, Pusdiklat dan 66 (Enam puluh Enam) BPS Kabupaten/Kota terhadap 5 (lima) komponen implementasi SAKIP BPS Provinsi, dimana penilaian evaluasi menggunakan *Sistem Field Evaluation* antara lain :

1. Satuan Kerja Setingkat Eselon II berasal dari BPS Provinsi, Pusdiklat dan Polstat STIS diperoleh hasil penilaian atau skor rata-rata sebesar **72,50** dengan kriteria nilai dalam kategori huruf adalah **“BB”**. Dengan 32 (tiga puluh dua) BPS Provinsi dan Pusdiklat yang memperoleh Kategori **“BB”** dan 2 (dua) BPS Provinsi memperoleh Kategori **“B”** dan Polstat STIS yang memperoleh kategori **“CC”**.
2. Satuan Kerja Setingkat Eselon III yakni BPS Kabupaten/Kota terpilih sampel diperoleh hasil penilaian atau skor rata-rata sebesar **62,02** dengan kriteria nilai dalam kategori huruf adalah **“B”**. Dengan 1 (satu) BPS Kabupaten/Kota yang memperoleh Kategori **“BB”**, 52 (lima puluh dua) BPS Kabupaten/Kota yang memperoleh Kategori **“B”**, 13 (tiga belas) BPS Kabupaten/Kota yang memperoleh Kategori **“CC”**.

Terdapat peningkatan pada Implementasi SAKIP tahun 2018-2019 antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi antara Biro Bina Program dan Inspektorat Utama dalam pengadaan Bimtek tentang Implementasi SAKIP untuk seluruh satker telah ditindaklanjuti dengan koordinasi antara Biro Bina Program dan Inspektorat Utama dalam penyusunan bahan paparan Pembinaan Implementasi SAKIP dan menjadi Instruktur Nasional dalam Pelatihan Instruktur daerah dan Biro Bina Program di Hotel Atria Serpong (Maret 2018), dilanjutkan dengan menjadi Pembinaan dilaksanakan oleh masing-masing BPS Provinsi dengan peserta antara lain Kepala dan seluruh pejabat struktural terkait serta staf pelaksana SAKIP BPS Provinsi dan BPS Kab/Kota (Maret s.d Mei 2018);
2. Meningkatkan koordinasi antara Binagram dengan Bagian Humas dalam melegalkan IKU yaitu dengan terselesaikannya Perka IKU No. 2 tahun 2019;
3. Mengimplementasikan e-SAKIP agar pelaksanaan dan evaluasi atas implementasi sakip berjalan optimal ditindaklanjuti dengan penerapan Si Monev dalam pengumpulan dokumen SAKIP seperti LKIP, Perjanjian Kinerja, Renstra, dan FRA;
4. Melaksanakan reviu terhadap dokumen perencanaan dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama dan kondisi saat ini ditindaklanjuti dengan seluruh satker menyusun Renstra Reviu II yang selaras dengan Perka IKU no. 2 tahun 2017;
5. Menyempurnakan Indikator Kinerja Individu agar selaras dengan atasannya, dan meningkatkan pemanfaatan dalam penilaian kinerja setiap Individu sebagai acuan dalam pemberian *reward and punishment* telah ditindaklanjuti dengan beberapa BPS

Provinsi telah mempunyai Indikator Kinerja Individu yang telah inline dengan penilaian CKP dan pemberian *reward and punishment*;

6. Meningkatkan keikutsertaan satker dalam penilaian WBK/WBBM dan Inovasi Manajemen Kinerja ditindaklanjuti dengan meningkatnya BPS Provinsi, Pusdiklat, Polstat STIS dan BPS Kabupaten/Kota yang memperoleh Predikat WBK/WBBM dari BPS dari 5 BPS Provinsi menjadi 13 BPS Provinsi yang memperoleh Predikat WBK serta telah meningkatnya BPS Provinsi yang memperoleh penghargaan Inovasi, hanya 14,29% yang belum memperoleh penghargaan inovasi;
7. Membentuk tim pengumpulan data kinerja ditindaklanjuti dengan terbentuknya tim pengumpulan data kinerja di BPS Provinsi seluruh Indonesia;
8. Melaksanakan Evaluasi Kinerja (rapat) berupa pembahasan kendala, solusi dan rekomendasi tentang tujuan, sasaran dan Indikator kinerja yang didukung dengan notulen yang berisi tentang kendala dan solusi (rekomendasi) yang akan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berkepentingan, ditindaklanjuti dengan beberapa BPS Provinsi yang telah melaksanakan Evaluasi Kinerja (Rapat) triwulanan yang membahas tentang capaian FRA bukan hanya evaluasi Kegiatan;
9. Meningkatkan pemanfaatan LKIP, ditindaklanjuti dengan menjadikan capaian Kinerja dalam LKIP sebagai acuan dalam penyusunan Perencanaan Kinerja di tahun yang akan datang; dan
10. Memperoleh Penghargaan lainnya, ditindaklanjuti dengan meningkatnya BPS Provinsi yang memperoleh penghargaan lainnya, hanya 28,57% BPS Provinsi yang belum memperoleh penghargaan lainnya.

Inspektorat Utama telah merekomendasikan beberapa hal untuk perbaikan kepada manajemen demi peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi, diantaranya:

1. Mendokumentasikan seluruh implementasi SAKIP misalnya dokumentasi rapat penyusunan Target Kinerja dalam Renstra dan Perjanjian Kinerja;
2. Target Jangka Menengah (Renstra) dimonitor pencapaiannya secara berkala minimal setahun sekali dan mendokumentasikan monitoring tersebut;
3. Biro Bina Program bekerja sama dengan MIS dalam penyusunan pengukuran kinerja berbasis Teknologi Informasi yang dapat diaplikasikan pada seluruh satker dan unit kerja BPS;
4. BPS membentuk tim penyusunan Indikator Kinerja Individu (IKI) yang terdiri dari perwakilan Inspektorat Utama, Biro Bina Program, Kepegawaian dan Subject matter yang bertugas menyusun Indikator Kinerja Individu (IKI) yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya dan dapat inline dalam pemberian *reward and punishment* pegawai;
5. Biro Binagram mensosialisasikan perhitungan Keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi yang akan disajikan LKIP;
6. Meningkatkan BPS Provinsi yang bukan hanya evaluasi kegiatan namun menghubungkannya dengan sasaran/indikator kinerja sasaran yang terkait dengan kegiatan tersebut

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Hukum.....	1
B. Latar Belakang	1
C. Tujuan dan Sasaran Evaluasi.....	2
D. Ruang Lingkup Evaluasi.....	2
E. Metodologi Evaluasi	2
F. Periode dan Jangka Waktu Evaluasi	3
G. Sampel Evaluasi	3
BAB II ORGANISASI DAN KEBIJAKAN.....	7
A. Umum Organisasi.....	7
B. Organisasi Evaluator	8
C. Kebijakan Evaluasi	9
BAB III HASIL EVALUASI.....	10
A. Penilaian dan Perbandingan Komponen Kinerja	10
B. Pengukuran Kinerja	13
C. Simpulan Kelemahan/Kekurangan Hasil Evaluasi	18
BAB IV REKOMENDASI	19
BAB V PENUTUP.....	20
LAMPIRAN	22

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;
9. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
10. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
11. Surat Tugas Inspektur Wilayah I Nomor: B-015/BPS/8010/01/2018 Tanggal 3 Januari 2018 tentang Koordinasi pelaksanaan Evaluasi Implementasi SAKIP (Persiapan, Pelaksanaan, Panelisasi dan Pelaporan)

B. Latar Belakang

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan tindak lanjut TAP MPR RI Nomor: XI/MPR/1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mengindahkan prinsip-prinsip *Clean Government* dan *Good Governance*, mewajibkan seluruh Kementerian/Lembaga dan Satuan Kerja di lingkungannya membuat LKIP Instansi Pemerintah (LKIP), sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan kinerja yang menjadi amanatnya.

Untuk menilai pencapaian kinerja yang dituangkan dalam LKIP Instansi Pemerintah tersebut, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi (KEMENPAN & RB) menugaskan kepada seluruh jajaran Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama/Inspektorat di lingkungan Instansi masing-masing untuk melaksanakan “Evaluasi” sesuai PERMENPAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang “Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”, dan Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2011 tentang “Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal”. Menindaklanjuti hal tersebut, Inspektur Utama melalui Inspektur Wilayah masing-masing telah menugaskan Auditor untuk melaksanakan evaluasi kinerja Tahun 2018-2019 pada BPS Provinsi, PolStat STIS, Pusdiklat, dan sampel BPS Kabupaten/Kota di lingkup Ibukota Provinsi.

C. Tujuan dan Sasaran Evaluasi

Tujuan

1. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
2. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
3. Mengidentifikasi kendala, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi;
4. Memperoleh peringkat penilaian hasil evaluasi pada masing-masing tingkat Eselon II dan Eselon III sampel *Field Evaluation*.

Sasaran

1. Satuan Kerja Setingkat Eselon II pada BPS Provinsi sebanyak 33 (tiga puluh tiga) Satker;
2. Satuan Kerja setingkat Eselon II pada Polstat STIS dan Pusdiklat;
3. Satuan Kerja Setingkat Eselon III pada BPS Kabupaten/Kota di lingkup Ibukota Provinsi sebanyak 66 (Enam puluh tiga) Satker.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

1. Evaluasi atas proses penerapan SAKIP dengan menerapkan Sistem Field Evaluation pada Satker terpilih;
2. Penilaian terhadap lima komponen manajemen kinerja;
3. Penilaian terhadap penyajian, pengungkapan dan dokumen pendukung informasi kinerja;
4. Evaluasi terhadap kebijakan manajemen terhadap akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan *Subject Matter* sampel terpilih; serta
5. Penilaian hasil evaluasi Satker BPS Provinsi, POLSTAT STIS, Pusdiklat dan BPS Kabupaten/Kota di lingkup Ibukota Provinsi.

E. Metodologi Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja yang tertuang dalam LKIP, yaitu:

1. Perencanaan Kinerja;
2. Pengukuran Kinerja;
3. Pelaporan Kinerja;

4. Evaluasi Kinerja; dan
5. Pencapaian Sasaran/Kinerja.

Pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan Sistem Evaluasi Lapangan (*Field Evaluation*), yakni melalui pengujian dan pembuktian di lapangan terhadap isi, dokumen pendukung maupun keterangan lainnya yang dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Rencana Strategis (Renstra), Penetapan Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya. Evaluasi dilaksanakan dengan melakukan teknik telaah, revidi, observasi, perbandingan data, konfirmasi dan analisis sederhana terhadap penerapan manajemen kinerja di Satker BPS Provinsi dilingkup Ibukota Provinsi melalui penerapan dokumen-dokumen tersebut di atas dan pelaksanaan evaluasi implementasi SAKIP juga dipengaruhi adanya *professional judgment* evaluator terhadap pemahaman dan pelaksanaan pengisian materi dalam suplemen Lembar Kerja Evaluasi.

F. Periode dan Jangka Waktu Evaluasi

Periode Evaluasi

Dokumen/kegiatan yang dievaluasi adalah Buku LKIP Tahun 2017, dokumen Renstra tahun 2015-2019 (revidi II), pelaporan monitoring capaian kinerja, pelaksanaan evaluasi Kinerja (triwulanan), Penghargaan dan dokumen lainnya yang diperlukan dari Triwulan II tahun 2018 s.d Triwulan II tahun 2019.

Jangka Waktu

Dilaksanakan dalam 2 (dua) gelombang masing-masing selama 5 (lima) hari kerja, yaitu: Gelombang pertama dimulai tanggal 4 s.d 9 Agustus 2019 dan Gelombang kedua dimulai tanggal 12 s.d 17 Agustus 2019.

G. Sampel Evaluasi

Adapun sampel Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2018-2019 dibagi menjadi 2 tahap, antara lain :

No	Tujuan	Evaluator Ketua Tim dan Anggota	Tanggal Pelaksanaan	Lama Hari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. INSPEKTORAT WILAYAH I				
GELOMBANG I				
1	BPS Provinsi Sumatera Barat Kab. Agam Kab. Pasaman Barat	1. Dedi Natalia 2. Suningsih	4 - 9 Agustus 2019	6
2	BPS Provinsi Kep. Bangka Belitung Kab. Bangka Barat Kab. Kabupaten Belitung	1. Siti Nurlaelatul B 2. Erika C.L	4 - 9 Agustus 2019	6
3	BPS Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin Kab. Barito Kuala	1. Alfidiansyah Ardief 2. Achmad Basuki	4 - 9 Agustus 2019	6

4	BPS Provinsi Sulawesi Tenggara Kab. Bombana Kab. Konawe	1. M. Rafiq 2. Andi Hasan F	4 - 9 Agustus 2019	6
5	BPS Provinsi Jawa Timur Kab. Jombang Kab. Kediri	1. Kelik Yunandar 2. Nanik Dwi S	4 - 9 Agustus 2019	6
6	BPS Provinsi Papua Kab. Jayapura Kab. Keerom	1. Endah W 2. Risma Febrianti M	4 - 9 Agustus 2019	6
GELOMBANG II				
7	BPS Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kab. OKI	1. Endah W 2. Vonny W	12 – 17 Agustus 2019	6
8	BPS Provinsi Kepulauan Riau Kota Tanjung Pinang Kota Batam	1. Alfidiansyah A 2. Roos Zunharir	12 – 17 Agustus 2019	6
9	BPS Provinsi D.I Yogyakarta Kota Yogyakarta Kab. Gunung Kidul	1. Suningsih 2. Siti Nurlaelatul B	12 – 17 Agustus 2019	6
10	BPS Provinsi Sulawesi Barat Kab. Mamuju Kab. Mamasa	1. Dadi Kurnadi 2. Dedi Natalia	12 – 17 Agustus 2019	6
11	BPS Provinsi Papua Barat Kab. Manokwari Kab. Teluk Bintuni	1. M.Rafiq 2. Eko Prasetyo	12 – 17 Agustus 2019	6
12	STIS	1.Deshinta Wijayanti 2.Risma Febrianti M	12 – 17 Agustus 2019	3
SUPERVISI				
1	BPS Provinsi Papua	Arbaatun Kurniasari	6 – 9 Agustus 2019	4
2	BPS Provinsi Sulawesi Barat, Kab. Mamuju	Eko Yuwono	14 – 17 Agustus 2019	4
B. INSPEKTORAT WILAYAH II				
GELOMBANG I				
1	BPS Provinsi Sulawesi Selatan Kab Wajo Kab Bone	1.Hesti Wulansari 2. Aditya Yudianto	4 - 9 Agustus 2019	6
2	BPS Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Barat BPS Kabupaten Kep Seribu	1.Ana Widiastuti 2.Sita Sih Adiasuti	5 - 9 Agustus 2019	5
3	BPS Provinsi Maluku Utara Kab. Morotai Kota Ternate	1. .Pudji Suprihatiningsih 2. Husaini	4 - 9 Agustus 2019	6
4	BPS Provinsi NTB Kota Bima Kab. Lombok Barat	1.Novrizal 2.Ratna Sari Pangesti	4 - 9 Agustus 2019	6

5	BPS Provinsi Jawa Barat Kab. Majalengka Kab. Cirebon	1. Andi Pujiono 2. Sukup Winardi	4 - 9 Agustus 2019	6
6	BPS Provinsi Sumatera Utara Kab. Tanjung Balai Kab. Samosir	1.S. Maruli T. Pane 2.Khalila Shahab	4 - 9 Agustus 2019	6
GELOMBANG II				
7	BPS Provinsi Riau Kab. Kepulauan Meranti Kab. Siak	1. Novrizal 2. Khalila Shahab	12 – 17 Agustus 2019	6
8	BPS Provinsi Kalimantan Barat Kab. Sanggau Kab. Sekadau.	1. Ana Widiastuti 2. Timmy Martin M	12 – 17 Agustus 2019	6
10	BPS Provinsi Sulawesi Utara Kota Kotamobagu Kota Manado	1.Nurmiati 2. Arif Santoso	12 – 17 Agustus 2019	6
11	BPS Provinsi Lampung Kab. Pesawaran Kota Bandar Lampung	1.Andi Pujiono 2. Pudji Suprihatiningsih	12 – 17 Agustus 2019	6
12	BPS Provinsi Bali Kab. Tabanan Kab. Karangasem	1. Hesti Wulansari 2. Haryanto	12 – 17 Agustus 2019	6
12	Sestama	1. Handarudigdaya JK 2. Sita Sih Adiastruti 3. Husaini	12 - 16 Agustus 2019	5
SUPERVISI				
1	BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kab. Bima	Diana Evaliza	6 – 9 Agustus 2019	4
2	BPS Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate	Puguh Prananto	6 – 9 Agustus 2019	4
3	BPS Provinsi Riau, Kab. Siak	Ihsanurijal	14 – 17 Agustus 2019	4
4	BPS Provinsi Kalimantan Barat, Kab. Sekadau	M. Subhan	14 – 17 Agustus 2019	4
5	BPS Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado	Tri Purwanto	14 – 17 Agustus 2019	4
C. INSPEKTORAT WILAYAH III				
GELOMBANG I				
1	BPS Provinsi Jawa Tengah Kab. Rembang Kab. Pati	1. Eneng Lisnawati 2. Mulia Andestar	4 - 9 Agustus 2019	6
2	BPS Provinsi Maluku Kab.Buru Kab.Buru Selatan	1. Amiruli Dwi L 2. Haris Sukendar	4 - 9 Agustus 2019	6
3	BPS Provinsi Bengkulu Kab. Bengkulu Selatan	1. Boy G. Ginting 2. Galih Asmara	4 - 9 Agustus 2019	6

	Kab. Bengkulu Utara	Bangun		
4	BPS Prov. Nusa Tenggara Timur Kab. Manggarai Barat Kab. Manggarai Timur	1. Ciko Oktaviano 2. Maria Theresia Marbun	4 - 9 Agustus 2019	6
5	BPS Provinsi Aceh Kota Sabang Kota Banda Aceh	1. Eko Libri Ardi 2. Lia Eka Permata	4 - 9 Agustus 2019	6
GELOMBANG II				
6	BPS Provinsi Gorontalo Kab. Gorontalo Kab. Pahuwato	1. Mansuroh 2. Galih Asmara Bangun	12 – 17 Agustus 2019	6
7	BPS Provinsi Kalimantan Timur Kota Samarinda Kab. Kutai Kertanegara	1. Pramaika Yoga Sentani 2. Nurlaila	12 – 17 Agustus 2019	6
8	BPS Provinsi Sulawesi Tengah Kota Palu Kab. Parigi Moutong	1. Eko Libri Ardi 2. Sujiartono	12 – 17 Agustus 2019	6
9	BPS Provinsi Kalimantan Tengah Kab. Gunung Mas Kab. Kota Waringin Timur	1. Ciko Oktaviano 2. Lia Eka Permata	12 – 17 Agustus 2019	6
10	BPS Provinsi Banten Kota Serang Kota Tangerang	1. Boy G Ginting 2. Dewi Yulia Anggraeni	12 – 17 Agustus 2019	6
11	BPS Provinsi Jambi Kab. Muaro Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur	1. Malik Imron 2. Hermano Adi	12 – 17 Agustus 2019	6
12	Pusdiklat	1. Nungki Nilasari 2. Nurlaila	5- 7 Agustus 2019	3
SUPERVISI				
1	BPS Provinsi Bengkulu, Kab. Bengkulu Selatan	Heru Tranggono	6 – 9 Agustus 2019	4
2	BPS Provinsi Kalimantan Timur, Kab. Kutai Kertanegara	Yani Kurniani	14 – 17 Agustus 2019	4
3	BPS Provinsi Sulawesi Tengah	Achmad Jaelani	14 – 17 Agustus 2019	4
4	BPS Provinsi Jambi, Kab. Tanjung Jabung Timur	Sulistiyowati	14 – 17 Agustus 2019	4

BAB II

ORGANISASI DAN KEBIJAKAN

A. Data Umum Organisasi

Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 pasal 1.

Dalam Pasal 2, BPS mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya fungsi BPS sesuai amanat Pasal 3 dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPS menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkajian, penyusunan, dan perumusan kebijakan di bidang statistik;
2. Pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional;
3. Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar;
4. Penetapan sistem statistik nasional;
5. Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik; dan
6. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan, dan rumah tangga.

Untuk mewujudkan tugas dan fungsi seperti tersebut di atas, maka BPS membentuk instansi-instansi vertikal sesuai tingkatan Pemerintahan Daerah (Pemda) yang disebut dengan BPS Provinsi setingkat Eselon II yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS dan BPS Kabupaten/Kota setingkat Eselon III dimana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS Provinsi. Hal ini berdasarkan Pasal 28 Perpres Nomor 86 Tahun 2007. Organisasi dan Tata Kerja BPS Provinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala BPS setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Saat ini, BPS telah memiliki Instansi Vertikal setingkat Eselon II sebanyak 35 (tiga puluh lima) Satuan Kerja (Satker) terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) BPS Provinsi, 1 (satu) Satker Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (POLSTAT STIS), dan 1 (satu) Satker Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat). Sedangkan Instansi Vertikal setingkat Eselon III adalah sebanyak 514 (lima ratus empat belas) Satker BPS Kabupaten/Kota. Jumlah ini belum termasuk telah berjalannya operasional Pemda hasil pemekaran, karena usulan pembentukan organisasi BPS di Pemda tersebut masih menunggu persetujuan dari pihak terkait, seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN&RB), Presiden dan DPR.

B. Organisasi Evaluator

Pasal 4, 24, 25 dan 26 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 yang selanjutnya dituangkan kembali pada Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Pasal 380 telah mengamanatkan organisasi untuk membentuk unit kerja Inspektorat Utama yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BPS. Selanjutnya, dalam pasal 381 disebutkan pula bahwa Inspektorat Utama BPS RI menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan pengawasan fungsional di lingkungan BPS;
2. Pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Kepala;
3. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

Untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang telah disebutkan, Inspektorat Utama BPS RI didukung dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Inspektorat Wilayah I;
2. Inspektorat Wilayah II;
3. Inspektorat Wilayah III;
4. Bagian Administrasi, terdiri dari :
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Subbagian Penyusunan Program, dan
 - c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk menjaga independensi penilaian evaluasi atas implementasi SAKIP, Inspektorat Utama juga mempunyai kebijakan dengan membagi beban kerja tugas dan fungsinya dalam *field evaluation* implementasi SAKIP yang tidak sesuai dengan nomenklatur sebagai berikut:

1. Inspektorat Wilayah I yang dipimpin oleh *Inspektur Wilayah I* mempunyai beban wilayah Satuan Kerja di lingkungan (Provinsi dan Kabupaten/Kota) Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Bali, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Riau, Lampung, Maluku Utara;
2. Inspektorat Wilayah II yang dipimpin oleh *Inspektur Wilayah II* mempunyai beban wilayah Satuan Kerja di lingkungan (Provinsi/Kabupaten/Kota) Sulawesi Tengah, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Jambi, Bengkulu, Banten, Maluku, Aceh, Kalimantan Tengah, Gorontalo serta Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat).;
3. Inspektorat Wilayah III yang dipimpin oleh *Inspektur Wilayah III* mempunyai beban wilayah Satuan Kerja di lingkungan (Provinsi/Kabupaten/Kota) Sumatera Selatan, Papua, Papua Barat, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Sulawesi Tenggara, DI Yogyakarta, Sulawesi Barat, Polstat STIS.

C. Kebijakan Evaluasi

Berdasarkan pertimbangan sumber daya manusia dan anggaran yang tersedia di Inspektorat Utama, baik dalam hal kuantitas dan kualitasnya berikut beban wilayah tugas ditambah beban kerja yang dirasakan semakin berat serta membutuhkan energi yang luar biasa, maka Inspektorat Utama memutuskan untuk melaksanakan Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2018-2019 dengan menitikberatkan kepada Satker BPS Provinsi, POLSTAT STIS, Pusdiklat serta BPS Kabupaten/Kota terpilih di lingkup Provinsi dengan *Sistem Field Evaluation*.

Untuk BPS Kabupaten/Kota yang tidak terpilih dalam pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2018-2019 secara *field evaluation*, evaluasi dilaksanakan secara *desk evaluation*. Hasil dari *desk Evaluation* tersebut akan dilaporkan pada bulan Desember 2019, yang akan digunakan sebagai acuan dalam pengukuran kinerja seluruh satker BPS Kabupaten/kota se-Indonesia.

BAB III

HASIL EVALUASI

Berdasarkan hasil penilaian evaluasi implementasi SAKIP tahun 2018-2019, 33 (tiga puluh tiga) Satuan Kerja BPS Provinsi, POLSTAT STIS, Pusdiklat dan 33 Satuan Kerja BPS Kabupaten/Kota terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang tertuang dalam LKIP, dokumen perencanaan dan dokumen lainnya atas BPS Provinsi, POLSTAT STIS, Pusdiklat dan BPS Kabupaten/Kota, dimana penilaian evaluasi menggunakan *Sistem Field Evaluation*, diperoleh nilai skor rata-rata, yaitu:

- 1) Satuan Kerja Setingkat Eselon II berasal dari BPS Provinsi, Pusdiklat dan Polstat STIS diperoleh hasil penilaian atau skor rata-rata sebesar **72,50** dengan kriteria nilai dalam kategori huruf adalah **“BB”**. Dengan 32 (tiga puluh dua) BPS Provinsi dan Pusdiklat yang memperoleh Kategori “BB” dan 2 (dua) BPS Provinsi memperoleh Kategori “B” dan Polstat STIS yang memperoleh kategori “CC”.
- 2) Satuan Kerja Setingkat Eselon III yakni BPS Kabupaten/Kota terpilih sampel diperoleh hasil penilaian atau skor rata-rata sebesar **62,02** dengan kriteria nilai dalam kategori huruf adalah **“B”**. Dengan 1 (satu) BPS Kabupaten/Kota yang memperoleh Kategori “BB”, 52 (lima puluh dua) BPS Kabupaten/Kota yang memperoleh Kategori “B”, 13 (tiga belas) BPS Kabupaten/Kota yang memperoleh Kategori “CC”.

Penilaian tersebut merupakan hasil murni dari tim evaluator setelah di reviu dan panelisasi oleh tim SAKIP Inspektorat Utama, yaitu dengan cara mereviu kembali dokumentasi yang diupload ke dalam website, mereviu konsistensi nilai yang diberikan dengan kelemahan satker, mempanelisasi seluruh hasil *field evaluation*, dan sebagainya, sehingga dengan kondisi yang sama, diharapkan dapat diberikan nilai yang sama pula.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Implementasi SAKIP tahun 2018 terdapat peningkatan kesadaran satker atas implementasi SAKIP, terbukti dengan adanya peningkatan dalam hal :

1. penyusunan Indikator Kinerja Individu;
2. pemberian Reward and punishment atas pegawai yang berkinerja;
3. pengukuran kinerja secara berkala;
4. pelaksanaan evaluasi kinerja secara berkala;
5. penyajian Informasi kinerja secara memadai;
6. perolehan penghargaan baik dari internal maupun eksternal
7. Perolehan predikat WBK-WBBM

A. Penilaian dan Perbandingan Komponen Kinerja

1. Hasil Akhir Satker *Field Evaluation*

Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian penilaian dan perbandingan dengan hasil evaluasi tahun lalu adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Perbandingan Hasil Penilaian Evaluasi Implementasi Satuan Kerja
BPS Provinsi, Pusdiklat dan Polstat STIS**

	BOBOT	2016	2017	2018	2019
A. PERENCANAAN KINERJA	30,00	25,27	24,43	24,76	23,92
B. PENGUKURAN KINERJA	25,00	17,96	18,36	18,38	18,51
C. PELAPORAN	15,00	9,90	10,68	11,00	11,17
D. EVALUASI KINERJA	10,00	5,54	6,28	6,62	6,89
E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI	20,00	9,48	9,92	10,39	12,01
<i>JUMLAH PENILAIAN (ANGKA)</i>	<i>100,00</i>	<i>68,13</i>	<i>69,67</i>	<i>71,16</i>	<i>72,50</i>
	<i>AA</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>BB</i>	<i>BB</i>

Berdasarkan nilai Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2019 untuk BPS Provinsi, Pusdiklat dan Polstat STIS oleh Evaluator Inspektorat Utama sebesar **72,50**, meningkat sebesar **1,88 %** atau naik **1,34** poin dibandingkan dengan hasil evaluasi tahun 2018 (**71,16**). Sehingga, walaupun kriteria penilaian semakin diperketat, secara keseluruhan terdapat peningkatan pemahaman dan implementasi SAKIP yang baik di seluruh Satuan Kerja BPS Provinsi, POLSTAT STIS dan Pusdiklat.

Lembar Kerja Evaluasi penilaian yang sama juga berlaku dalam pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP di lingkungan BPS Kabupaten/Kota. Namun demikian, berbeda dengan Evaluasi atas Implementasi SAKIP yang dilakukan pada Satker BPS Provinsi, POLSTAT STIS dan Pusdiklat yang dilakukan secara rutin, sedangkan evaluasi yang dilakukan kepada Satker BPS Kabupaten/Kota tidak selalu sama tiap tahunnya, sehingga yang menjadi sampel evaluasi atas implementasi SAKIP tahun 2018 kabupaten/kota berbeda dengan tahun sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar semua Kabupaten/kota dapat mengimplementasikan SAKIP sebagaimana ketentuannya. Namun secara keseluruhan Hasil penilaian Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2019 sebesar **62,88** peningkatan 1,39% atau naik **0,86** poin dari penilaian tahun 2018 (**62,02**).

Untuk lebih jelasnya, disajikan perbandingan penilaian Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2016 sampai dengan 2019 tingkat BPS Kabupaten/Kota pada masing-masing komponen kerjanya sesuai tabel dibawah ini.

Tabel 3.2 Perbandingan Penilaian Evaluasi Implementasi SAKIP Satuan Kerja BPS Kabupaten/Kota

	BOBOT	2016	2017	2018	2019
A. PERENCANAAN KINERJA	30,00	22,35	19,27	22,02	21,94
B. PENGUKURAN KINERJA	25,00	15,38	15,52	16,90	16,55
C. PELAPORAN	15,00	9,52	8,71	9,43	9,89
D. EVALUASI KINERJA	10,00	4,89	5,31	5,54	5,08
E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI	20,00	7,49	6,72	8,13	9,52
<i>JUMLAH PENILAIAN (ANGKA)</i>	<i>100,00</i>	<i>59,63</i>	<i>55,53</i>	<i>62,02</i>	<i>62,88</i>
	AA	CC	CC	B	B

2. Penilaian dan Perbandingan per-Komponen Kinerja

Berikut ini kami sampaikan hasil perbandingan per Komponen Kinerja, hasil penilaian Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2018-2019 setelah direviu dan panelisasi oleh Tim Evaluasi atas implementasi sakip Inspektorat Utama.

a. Perencanaan Kinerja

Secara keseluruhan, rata-rata capaian organisasi terhadap indikator-indikator yang terdapat dalam komponen perencanaan kinerja hasil evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2018-2019 baik penilaian evaluasi Satker BPS Provinsi, POLSTAT STIS, Pusdiklat dan BPS Kabupaten/kota mengalami **penurunan** dari hasil Evaluasi atas implementasi tahun 2015, 2016, 2017, 2018 Untuk evaluasi atas implementasi SAKIP BPS Provinsi, POLSTAT STIS, dan pusdiklat sebesar **24,76** mengalami penurunan sebesar **(-0,34%)** atau **(-0,85)** poin dari penilaian tahun 2019 sebesar **23,91**.

Sedangkan untuk penilaian evaluasi BPS Kabupaten/Kota mengalami penurunan sebesar **(-0,36%)** atau **(-0,08)** poin dari hasil evaluasi Tahun 2018 sebesar **22,02**, sementara pada tahun 2019 menjadi **21,94** poin. Hal ini terjadi karena terdapat BPS Kabupaten/Kota yang telah mengupload dokumen Renstra Tahun 2015-2019 (Reviu II) namun belum ditandatangani oleh Kepala BPS Kabupaten/kota.

Pencapaian kinerja untuk komponen ini untuk seluruh Satker sudah dianggap baik, terutama kualitas Rencana Strategis (Renstra), Penetapan Kinerja (PK) yang sudah berorientasi kepada hasil dan bersifat SMART. Walaupun demikian, masih perlu penyempurnaan dalam pelaksanaan monitoring dan pemanfaatan rencana aksi dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan.

Adapun tabel perbandingan penilaian komponen Perencanaan Kinerja hasil evaluasi atas implementasi SAKIP adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3 Perbandingan Penilaian Komponen Perencanaan Kinerja
BPS Provinsi, POLSTAT STIS dan Pusdiklat**

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Hasil Penilaian				
			2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	Perencanaan Strategis	12,50/ 10,00	8,44	8,75	8,54	7,69	7,52
II	Perencanaan Kinerja Tahunan	22,50/ 20,00	16,61	16,52	15,89	17,07	16,39
	Rata-Rata Penilaian	35,00/ 30,00	25,05	25,27	24,43	24,76	23,91

**Tabel 3.4 Perbandingan Penilaian Komponen Perencanaan Kinerja
BPS Kabupaten/Kota**

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Hasil Penilaian				
			2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	Perencanaan Strategis	12,50/ 10,00	7,67	7,99	6,08	6,29	6,7
II	Perencanaan Kinerja Tahunan	22,50/ 20,00	16,3 0	14,3 6	13,1 9	15,74	15,24
	Rata-Rata Penilaian	35,00 / 30,00	23,9 7	22,3 5	19,2 7	22,02	21,94

B. Pengukuran Kinerja

Secara keseluruhan, rata-rata capaian organisasi terhadap indikator-indikator yang terdapat dalam komponen ini mengalami peningkatan sebesar **0,12** poin dari tahun 2018 yakni **18,38** poin menjadi **18,50** poin di tahun 2018. Hal ini terjadi pada penilaian evaluasi BPS Provinsi, POLSTAT STIS dan Pusdiklat. Hal yang sama juga terjadi pada penilaian evaluasi BPS Kabupaten/Kota, dimana penurunan penilaian evaluasi sebesar **2,07%** atau **0,35** poin, dimana hasil penilaian pada Tahun 2018 adalah sebesar **16,90** dan naik pada tahun 2019 sebesar **16,55** poin. Hal ini disebabkan belum adanya Indikator Kinerja Individu, belum tertibnya prosedur pengumpulan dan keandalan data kinerja, serta belum diterapkannya teknologi informasi dalam kegiatan tersebut. Selain itu, belum maksimalnya pemanfaatan IKU dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran maupun untuk pengukuran kinerja.

Adapun Adapun tabel perbandingan penilaian komponen Pengukuran Kinerja hasil evaluasi atas implementasi SAKIP adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.5 Perbandingan Penilaian Komponen Pengukuran Kinerja
BPS Provinsi, POLSTAT STIS dan Pusdiklat**

NO	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Hasil Penilaian				
			2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	Pemenuhan Pengukuran	4,00/ 5,00	3,13	4,67	4,33	4,80	4,49
II	Kualitas Pengukuran	10,00/ 12,50	7,07	8,97	9,37	9,04	9,29
III	Implementasi Pengukuran	6,00/ 7,50	3,43	4,31	4,66	4,53	4,72
	Rata-Rata Penilaian	20,00/ 25,00	13,6 3	17,96	18,36	18,38	18,50

**Tabel 3.6 Perbandingan Penilaian Komponen Pengukuran Kinerja
BPS Kabupaten/Kota**

NO	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Hasil Penilaian				
			2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	Pemenuhan Pengukuran	4,00/ 5,00	2,97	3,68	3,79	4,44	4,14
II	Kualitas Pengukuran	10,00/ 12,50	6,55	7,87	8,22	8,22	8,19
III	Implementasi Pengukuran	6,00/ 7,50	3,16	3,83	3,51	4,24	4,25
	Rata-Rata Penilaian	20,00/ 25,00	12,6 8	15,3 8	15,5 2	16,9 0	16,5 5

b. Pelaporan Kinerja

Dari lima komponen penilaian yang dilaksanakan evaluasi, hanya komponen “Pelaporan” yang menggunakan dokumen tahun 2018 yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Secara keseluruhan, rata-rata penilaian Pelaporan mengalami kenaikan **1,45%** atau naik **0,16** poin dari tahun 2018, **11,01** poin menjadi **11,17** poin pada tahun 2019. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, terdapat peningkatan kualitas Pelaporan pada BPS Provinsi, terutama pada penyajian analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan keuangan dan penyajian anggaran berbasis kinerja. Peningkatan serupa terjadi pada penilaian evaluasi implementasi SAKIP di BPS Kabupaten/Kota, dimana terdapat peningkatan **4,88%** atau **0,46** poin dari hasil penilaian dalam komponen ini

pada tahun 2018 sebesar **9,43** poin menjadi **9,89** poin pada tahun 2019. Hal ini terjadi karena adanya Peningkatan nilai pada kualitas penyusunan LKIP BPS Kabupaten/Kota antara lain:

- Peningkatan jumlah satker yang menyusun LKIP dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja, dan monitoring triwulanan (FRA);
- Peningkatan jumlah satker yang menyajikan informasi keuangan per sasaran, dari yang sebelumnya per program;
- Peningkatan jumlah satker yang menyajikan informasi perbandingan yang memadai; dan
- Peningkatan jumlah satker yang menyajikan informasi analisis dan evaluasi yang memadai;

Adapun tabel perbandingan penilaian komponen Pelaporan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.7 Perbandingan Penilaian Komponen Pelaporan
BPS Provinsi, POLSTAT STIS, dan Pusdiklat**

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Hasil Penilaian				
			2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	Pemenuhan Pelaporan	3,00 / 3,00	2,73	2,87	2,99	2,98	2,82
II	Kualitas Penyajian Informasi Kinerja	8,00 / 7,50	4,49	4,23	4,91	5,13	5,18
III	Pemanfaatan Informasi Kinerja	4,00 / 4,50	1,99	2,80	2,79	2,90	3,17
	Rata-Rata Penilaian	15,00	9,21	9,90	10,68	11,01	11,17

**Tabel 3.8 Perbandingan Penilaian Komponen Pelaporan
BPS Kabupaten/Kota**

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Hasil Penilaian				
			2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	Pemenuhan Pelaporan	3,00 / 3,00	2,67	2,80	2,68	2,83	2,80
II	Kualitas Penyajian Informasi Kinerja	8,00 / 7,50	3,91	4,01	3,83	4,14	4,33
III	Pemanfaatan Informasi Kinerja	4,00 / 4,50	1,94	2,72	2,21	2,45	2,77
	Rata-Rata Penilaian	15,00	8,53	9,52	8,71	9,43	9,89

c. Evaluasi Kinerja

Secara keseluruhan, rata-rata capaian organisasi terhadap indikator-indikator yang terdapat dalam komponen “evaluasi kinerja” mengalami kenaikan sebesar **3,92%** atau naik **0,26** poin untuk Satker BPS Provinsi, POLSTAT STIS, dan Pusdiklat dari semula hasil Tahun 2018 sebesar **6,62** poin menjadi **6,88** poin hasil penilaian tahun 2019. Sedangkan untuk BPS Kabupaten/Kota mengalami penurunan sebesar **0,46** poin dari **5,54** menjadi **5,08** poin pada penilaian tahun 2019. Hal ini terjadi karena sample yang dievaluasi belum seluruhnya melaksanakan evaluasi kinerja secara berkala, yang didukung dengan notulen rapat.

Adapun tabel perbandingan penilaian komponen Evaluasi Kinerja hasil evaluasi atas implementasi SAKIP adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9 Perbandingan Penilaian Komponen Evaluasi Kinerja BPS Provinsi, POLSTAT STIS, dan Pusdiklat

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Hasil Penilaian				
			2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	Pemenuhan Evaluasi	2,00	1,76	1,39	1,74	1,85	1,74
II	Kualitas Evaluasi	5,00	2,61	2,69	3,05	3,25	3,40
III	Pemanfaatan Hasil Evaluasi	3,00	1,48	1,46	1,49	1,514	1,74
	Rata-Rata Penilaian	10,00	5,85	5,54	6,28	6,62	6,88

Tabel 3.10 Perbandingan Penilaian Komponen Evaluasi Kinerja BPS Kabupaten/Kota

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Hasil Penilaian				
			2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	Pemenuhan Evaluasi	2,00	1,64	0,93	1,57	1,49	1,37
II	Kualitas Evaluasi	5,00	2,48	2,47	2,33	2,54	2,38
III	Pemanfaatan Hasil Evaluasi	3,00	1,41	1,50	1,41	1,51	1,33
	Rata-Rata Penilaian	10,00	5,53	4,89	5,31	5,54	5,08

Kelemahan ini sebagian besar disumbangkan karena belum seluruh satker dilaksanakan evaluasi kinerja secara berkala (triwulanan), masih

sebatas evaluasi kegiatan. Jikapun ada satker yang melakukan evaluasi kinerja, belum terdokumentasinya bukti dukung dilaksanakannya evaluasi kinerja tersebut, sehingga evaluasi kinerja belum menghasilkan rekomendasi terbaik untuk perbaikan manajemen, dan akhirnya Satker tidak dapat menindaklanjuti apa yang semestinya diperbaiki karena ketiadaan evaluasi tersebut.

d. Pencapaian Sasaran/Kinerja

Hasil penilaian evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2018-2019 yang memiliki andil yang cukup besar adalah penilaian pada komponen “pencapaian sasaran/kinerja organisasi”. Berdasarkan hasil penilaian komponen tersebut diperoleh nilai rata-rata adalah sebesar **12,01** poin untuk penilaian evaluasi BPS Provinsi, POLSTAT STIS dan Pusdiklat serta sebesar **9,52** poin untuk hasil penilaian evaluasi BPS Kabupaten/Kota. Hasil ini mengalami peningkatan penilaian dibandingkan hasil penilaian evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2018 untuk kedua tingkatan tersebut, dimana rata-rata hasil penilaian evaluasi Implementasi SAKIP satker BPS Provinsi mengalami peningkatan **1,03** poin dari tahun 2018 atau sebesar **4,74%** dari 10,39 poin menjadi **12,01** poin tahun 2019 dan rata-rata hasil penilaian evaluasi Satker BPS Kabupaten Kota mengalami peningkatan sebesar **17,1%** atau **1,39** poin dari tahun 2018 sebesar **8,13** poin menjadi **9,52** poin tahun 2019. Hal ini terjadi karena telah meningkatnya jumlah satker yang pencapaian target optimal, dan masih telah dapat diandalkannya informasi kinerja yang disajikan. Namun masih sedikitnya Satker di lingkungan BPS yang mendapat penghargaan-penghargaan perihal kinerja oleh Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah lainnya dan atau pihak Swasta, Inisiatif dalam Pemberantasan Korupsi dan Inovasi manajemen Kinerja.

Adapun tabel perbandingan penilaian komponen Pencapaian Kinerja hasil evaluasi atas implementasi SAKIP adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11 Perbandingan Penilaian Komponen Pencapaian Kinerja satker BPS Provinsi, POLSTAT STIS dan Pusdiklat

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Hasil Penilaian				
			2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	Kinerja Yang Dilaporkan (<i>Output</i>)	5,00	2,50	2,88	2,92	2,74	3,33
II	Kinerja Yang Dilaporkan (<i>Outcome</i>)	10,00	4,98	5,36	5,81	5,48	4,12
III	Kinerja Lainnya	5,00	3,36	1,24	1,19	2,18	4,56
	Rata-Rata Penilaian	20,00	10,84	9,48	9,92	10,39	12,01

**Tabel 3.12 Perbandingan Penilaian Komponen Pencapaian Kinerja
BPS Kabupaten/Kota**

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Hasil Penilaian				
			2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
I	Kinerja Yang Dilaporkan (<i>Output</i>)	5,00	2,31	2,88	2,11	2,54	2,9
II	Kinerja Yang Dilaporkan (<i>Outcome</i>)	10,00	4,62	4,27	4,22	5,08	5,72
III	Kinerja Lainnya	5,00	3,07	0,34	0,39	0,52	0,90
	Rata-Rata Penilaian	20,00	10,00	7,49	6,72	8,13	9,52

C. Simpulan Kelemahan/Kekurangan Hasil Evaluasi

Terhadap hasil penilaian yang telah dilaksanakan, secara keseluruhan dapat disimpulkan terdapat peningkatan atas implementasi SAKIP BPS Provinsi, Pusdiklat dan BPS Kabupaten Kota. Hal tersebut terjadi karena keberhasilan Pembinaan SAKIP yang telah dilakukan Biro Bina Program BPS atas seluruh satker BPS sehingga terdapat peningkatan pengetahuan satker tentang Implementasi SAKIP dan dapat diimplementasikan sesuai ketentuan. Namun masih ditemukan kelemahan/kekurangan yang harus mendapat perhatian manajemen demi peningkatan implementasi SAKIP, yaitu:

1. Perencanaan Kinerja jangka Menengah dalam Renstra belum di-*monitoring* pencapaiannya;
2. Penetapan target Kinerja belum didokumentasikan;
3. Belum seluruhnya satker yang telah memiliki Indikator kinerja individu, diimplementasikan dalam penilaian kinerja pegawai;
4. Belum seluruh satker mengacu pada IKI yang tersusun pada Pelaksanaan pemberian *reward and punishment*;
5. Ketidakandalan informasi yang disajikan baik dalam FRA maupun LKIP;
6. Beberapa LKIP masih belum menyajikan informasi yang memadai;
7. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh BPS Kabupaten/kota namun anggarannya di BPS Provinsi, belum dilaporkan dalam LKIP sebagai kinerja BPS Kabupaten/kota;
8. Evaluasi kinerja masih sebatas evaluasi kegiatan, belum dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;

BAB IV

REKOMENDASI

Terhadap hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018 untuk BPS Provinsi, POLSTAT STIS, Pusdiklat dan BPS Kabupaten/Kota, Inspektorat Utama merekomendasikan beberapa langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

1. Target Jangka Menengah (Renstra) dimonitor pencapaiannya secara berkala minimal setahun sekali dan mendokumentasikan monitoring tersebut;
2. Biro Bina Program bekerja sama dengan Deputi MIS dalam penyusunan pengukuran kinerja berbasis Teknologi Informasi yang dapat diaplikasikan pada seluruh satker dan unit kerja BPS;
3. BPS membentuk tim penyusunan Indikator Kinerja Individu (IKI) yang terdiri dari perwakilan Inspektorat Utama, Biro Bina Program, Kepegawaian dan Subject matter yang bertugas menyusun Indikator Kinerja Individu (IKI) yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya dan dapat *inline* dalam pemberian *reward and punishment* pegawai;
4. Biro Bina Program menentukan kegiatan apa saja yang menjadi kinerja BPS Kabupaten/kota, atau BPS Provinsi, atau keduanya;
5. Evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Satker setiap triwulan sebaiknya bukan hanya pada evaluasi kegiatan saja namun menghubungkannya dengan sasaran/indikator kinerja sasaran yang terkait dengan kegiatan tersebut;
6. Sestama mengadakan pembinaan atau pelatihan untuk tim SAKIP yang mengelola implementasi SAKIP di seluruh satker, secara berkesinambungan.
7. BPS Provinsi berperan serta dalam hal peningkatan implementasi SAKIP pada satker Kabupaten/kota dibawahnya.

BAB V

PENUTUP

Tim Evaluasi atas implementasi SAKIP dengan segala keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan ini telah berupaya maksimal dalam menyelesaikan setiap tahapan penilaian sakip Satuan Kerja yang menjadi obyek Evaluasi Implementasi SAKIP tahun 2018-2019, dan seobjektifitas mungkin dalam penentuan Peringkat Satker. Namun demikian, kami menyadari bahwa hasil akhir yang kami hasilkan tidak dapat memuaskan semua pihak dan tentunya akan kembali dilaksanakan evaluasi ulang oleh Tim Evaluasi atas implementasi sakip KemenPAN & RB, sehingga kemungkinan adanya hasil penilaian yang berbeda dapat saja terjadi.

Oleh karena itu, kami berharap apapun hasil penilaian oleh Tim KemenPAN & RB dapat menghasilkan laporan yang memuaskan semua pihak dan menjadi penambah wawasan seluruh Satuan Kerja dan atau *Subject Matter* dalam mengelola kinerjanya menjadi lebih baik. Koreksi, arahan dan petunjuk Tim Evaluasi KemenPAN & RB sangat kami harapkan demi mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil *outcome/output* terhadap penggunaan anggaran dan kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja BPS.



LAMPIRAN

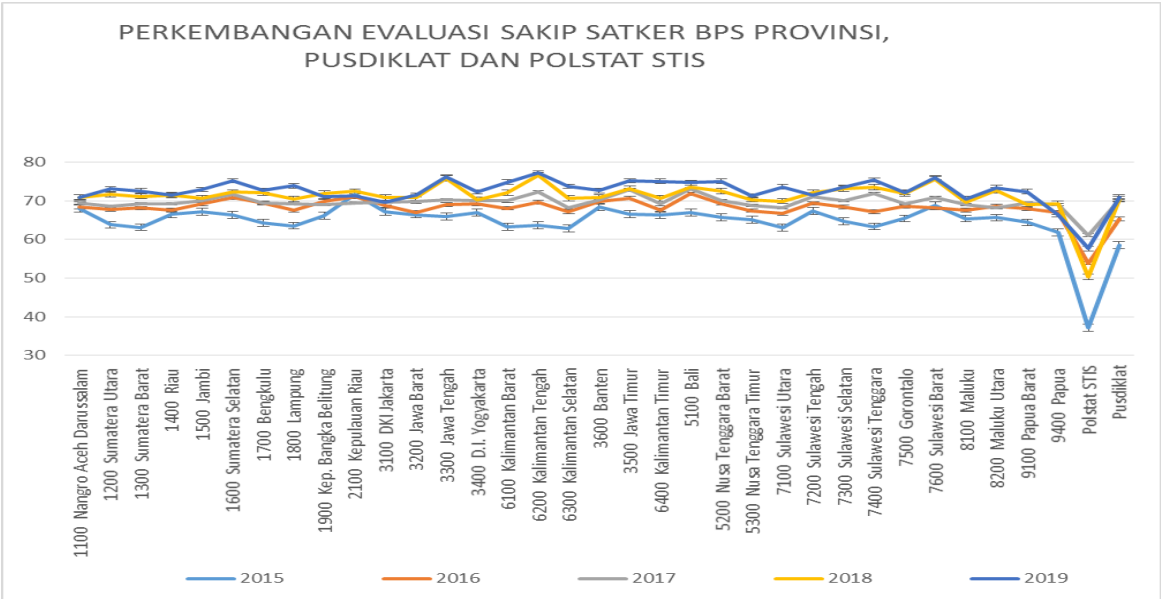
LAMPIRAN

LAMPIRAN - 1

LAPORAN HASIL EVALUASI BPS PROVINSI, PUSDIKLAT, DAN POLTEKSTAT STIS SETINGKAT ESELON II TAHUN 2018-2019

NO	SATUAN KERJA	NILAI SAKIP
1	BPS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	77,13
2	BPS PROVINSI JAWA TENGAH	76,22
3	BPS PROVINSI SULAWESI BARAT	76,02
4	BPS PROVINSI SULAWESI TENGGARA	75,39
5	BPS PROVINSI SUMATERA SELATAN	75,16
6	BPS PROVINSI JAWA TIMUR	75,14
7	BPS PROVINSI NTB	75,06
8	BPS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	75,02
9	BPS PROVINSI KALIMANTAN BARAT	74,83
10	BPS PROVINSI BALI	74,7
11	BPS PROVINSI LAMPUNG	73,88
12	BPS PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	73,69
13	BPS PROVINSI SULAWESI UTARA	73,61
14	BPS PROVINSI SULAWESI SELATAN	73,53
15	BPS PROVINSI MALUKU UTARA	73,42
16	BPS PROVINSI SUMATERA UTARA	73,01
17	BPS PROVINSI JAMBI	72,92
18	BPS PROVINSI BENGKULU	72,7
19	BPS PROVINSI BANTEN	72,65
20	BPS PROVINSI SUMATERA BARAT	72,58
21	BPS PROVINSI PAPUA BARAT	72,34
22	BPS PROVINSI D.I.YOGYAKARTA	72,29
23	BPS PROVINSI GORONTALO	72,17
24	BPS PROVINSI RIAU	71,51
25	BPS PROVINSI JAWA BARAT	71,48
26	BPS PROVINSI SULAWESI TENGAH	71,39
27	BPS PROVINSI KEPULAUAN RIAU	71,29
28	BPS PROVINSI NTT	71,26
29	BPS PROVINSI BANGKA BELITUNG	71,12
30	BPS PROVINSI ACEH	70,95
31	PUSDIKLAT	70,95
32	BPS PROVINSI MALUKU	70,49
33	BPS PROVINSI DKI JAKARTA	69,52
34	BPS PROVINSI PAPUA	66,29
35	POLSTAT STIS	57,61
	RATA-RATA	72,49

LAMPIRAN – 2



Lampiran 3

**LAPORAN HASIL EVALUASI
BPS KABUPATEN / KOTA
SETINGKAT ESELON III
TAHUN 2018 – 2019**

NO	SATKER	2019
1	BPS Kota Samarinda	73,33
2	BPS Kab. Oki	68,77
3	BPS kab. Kutai Kertanegara	68,73
4	BPS Kab. Gunung Mas	67,99
5	BPS Kota Palembang	67,48
6	BPS Kab. Kotawaringin Timur	67,42
7	BPS Kota Palu	67,15
8	BPS Kab. Siak	67,05
9	BPS Kab. Bombana	66,62
10	BPS Kab. Gorontalo	66,45
11	BPS Kota Manado	66,21
12	BPS Kab. Tanjung Jabung Timur	65,95
13	BPS Kab. Bengkulu Utara	65,68
14	BPS Kota Bandarlampung	65,54
15	BPS Kab. Jombang	65,48
16	BPS Kab. Pahuwato	65,46
17	BPS Kab. Mamasa	65,26
18	BPS Kota Kotamobagu	65,08
19	BPS Kab. Karangasem	65,03
20	BPS Kab. Konawe	64,87
21	BPS Kab. Tabanan	64,7
22	BPS Kab. Sanggau	64,51
23	BPS kab. kepulauan meranti	64,39
24	BPS Kab. Pesawaran	64,37
25	BPS Kab. Tanjung Balai	64,19
26	BPS Kab. Wajo	64,09
27	BPS Kota Yogyakarta	64,03
28	BPS Kota Banjarmasin	64,01
29	BPS Kab. Muaro Jambi	63,85
30	BPS Kab. gunung Kidul	63,84
31	BPS Kab. Jayapura	63,77
32	BPS kab. Lombok Barat	63,76
33	BPS Kab. Majalengka	63,54
34	BPS Kab. manggarai Barat	63,31
35	BPS Kab. Sekadau	63,26
36	BPS Kab. Bone	63,25

NO	SATKER	2019
37	BPS Kab. Rembang	63,16
38	BPS Kab. Cirebon	63,12
39	BPS Kota Serang	63,08
40	BPS Kota Tangerang	63,05
41	BPS Kota Sabang	62,51
42	BPS Kab. Bengkulu Selatan	62,49
43	BPS kota Jakarta barat	62,46
44	BPS Kab. Kediri	62,35
45	BPS Kab. Agam	62,29
46	BPS Kota Bima	62,21
47	BPS Kab. Morotai	61,88
48	BPS Kab. Parigi Moutong	61,35
49	BPS Kab. Belitung	61,21
50	BPS kab. Kep. Seribu	61,07
51	BPS kab. Pasaman	60,81
52	BPS Kab. Manggarai Timur	60,38
53	BPS Kota Ternate	60,32
54	BPS Kab. Pati	59,37
55	BPS Kab. Buru Selatan	59,07
56	BPS Kab. Keerom	58,97
57	BPS Kota Banda Aceh	58,35
58	BPS Kab. Samosir	58,06
59	BPS Kab. Manokwari	57,76
60	BPS Kota Tanjung Pinang	57,36
61	BPS Kab. Bangka Barat	56,96
62	BPS Kab. Teluk Bintuni	56,87
63	BPS Kab. Barito Kuala	55,47
64	BPS Kota Batam	54,48
65	BPS Kab. Mamuju	53,36
66	BPS Kab. Buru	52,16

Lampiran 4

**PERKEMBANGAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN/KOTA TAHUN 2018 – 2019**

NO	SATKER	Tahun	
		2018 (DESK)	2019 (FIELD)
1	BPS Kota Samarinda	56,89	73,33
2	BPS Kab. Oki	61,95	68,77
3	BPS kab. Kutai Kertanegara	61,5	68,73
4	BPS Kab. Gunung Mas	62,28	67,99
5	BPS Kota Palembang	60,95	67,48
6	BPS Kab. Kotawaringin Timur	63,73	67,42
7	BPS Kota Palu	61,05	67,15
8	BPS Kab. Siak	59,62	67,05
9	BPS Kab. Bombana	63,78	66,62
10	BPS Kab. Gorontalo	60,45	66,45
11	BPS Kota Manado	58,47	66,21
12	BPS Kab. Tanjung Jabung Timur	59,42	65,95
13	BPS Kab. Bengkulu Utara	52,02	65,68
14	BPS Kota Bandarlampung	59,7	65,54
15	BPS Kab. Jombang	60,24	65,48
16	BPS Kab. Pahuwato	59,96	65,46
17	BPS Kab. Mamasa	62,87	65,26
18	BPS Kota Kotamobagu	57,81	65,08
19	BPS Kab. Karangasem	61,58	65,03
20	BPS Kab. Konawe	63,42	64,87
21	BPS Kab. Tabanan	54,8	64,7
22	BPS Kab. Sanggau	59,49	64,51
23	BPS kab. kepulauan meranti	60	64,39
24	BPS Kab. Pesawaran	59,78	64,37
25	BPS Kab. Tanjung Balai	61,06	64,19
26	BPS Kab. Wajo	58,96	64,09
27	BPS Kota Yogyakarta	60,98	64,03
28	BPS Kota Banjarmasin	61,52	64,01
29	BPS Kab. Muaro Jambi	60,45	63,85
30	BPS Kab. gunung Kidul	58,12	63,84
31	BPS Kab. Jayapura	46,74	63,77
32	BPS kab. Lombok Barat	59,45	63,76
33	BPS Kab. Majalengka	59,79	63,54
34	BPS Kab. manggarai Barat	61,86	63,31
35	BPS Kab. Sekadau	59,44	63,26
36	BPS Kab. Bone	54,21	63,25
37	BPS Kab. Rembang	63,37	63,16

NO	SATKER	Tahun	
		2018 (DESK)	2019 (FIELD)
38	BPS Kab. Cirebon	56,89	63,12
39	BPS Kota Serang	63,49	63,08
40	BPS Kota Tangerang	63,44	63,05
41	BPS Kota Sabang	57,97	62,51
42	BPS Kab. Bengkulu Selatan	60,3	62,49
43	BPS kota Jakarta barat	62,38	62,46
44	BPS Kab. Kediri	57,24	62,35
45	BPS Kab. Agam	56,9	62,29
46	BPS Kota Bima	58,79	62,21
47	BPS Kab. Morotai	60,32	61,88
48	BPS Kab. Parigi Moutong	59,17	61,35
49	BPS Kab. Belitung	59,56	61,21
50	BPS kab. Kep. Seribu	61,76	61,07
51	BPS kab. Pasaman	63,73	60,81
52	BPS Kab. Manggarai Timur	56,17	60,38
53	BPS Kota Ternate	60,05	60,32
54	BPS Kab. Pati	63,01	59,37
55	BPS Kab. Buru Selatan	55,42	59,07
56	BPS Kab. Keerom	54,23	58,97
57	BPS Kota Banda Aceh	54,72	58,35
58	BPS Kab. Samosir	57,46	58,06
59	BPS Kab. Manokwari	50	57,76
60	BPS Kota Tanjung Pinang	59,83	57,36
61	BPS Kab. Bangka Barat	59,49	56,96
62	BPS Kab. Teluk Bintuni	55,13	56,87
63	BPS Kab. Barito Kuala	59,82	55,47
64	BPS Kota Batam	55,69	54,48
65	BPS Kab. Mamuju	60,73	53,36
66	BPS Kab. Buru	44,07	52,16

Lampiran 5

**REKAPITULASI LEMBAR KRITERIA EVALUASI
(CRITERIA-REFERENCED TEST)
IMPLEMENTASI ATAS AKUNTABILITAS KINERJA
SATUAN KERJA BPS PROVINSI, STIS DAN PUSDIKLAT - TAHUN 2019 (FIELD)**

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BPS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	BPS PROVINSI JAWA TENGAH	BPS PROVINSI SULBAR	BPS PROVINSI SULAWESI TENGGERA	BPS PROVINSI SUMATERA SELATAN	BPS PROVINSI JAWA TIMUR	BPS PROVINSI NTB	BPS PROVINSI KALTIM	BPS PROVINSI KALIMANTAN BARAT	BPS PROVINSI BALI	BPS PROVINSI LAMPUNG	BPS PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	BPS PROVINSI SULAWESI UTARA
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
NILAI HASIL EVALUASI		77,13	76,22	76,02	75,39	75,16	75,14	75,06	75,02	74,83	74,70	73,88	73,69	73,61
TINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA		BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
CANAAN KINERJA		23,99	24,44	23,78	24,24	24,49	23,84	23,54	23,83	23,79	24,19	24,49	24,13	23,69
I.	PERENCANAAN STRATEGIS	7,69	7,94	7,23	7,69	7,94	7,29	7,29	7,58	7,54	7,94	7,94	7,58	7,44
a.	PEMENUHAN (2%)	1,94	1,94	1,89	1,94	1,94	1,94	1,94	1,83	1,94	1,94	1,94	1,83	1,94
b.	KUALITAS RENSTRA (5%)	3,75	3,75	3,59	3,75	3,75	3,59	3,59	3,75	3,59	3,75	3,75	3,75	3,75
c.	IMPLEMENTASI RENSTRA	2,00	2,25	1,75	2,00	2,25	1,75	1,75	2,00	2,00	2,25	2,25	2,00	1,75
II.	PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN	16,30	16,50	16,55	16,55	16,55	16,55	16,25	16,25	16,25	16,25	16,55	16,55	16,25
a.	PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
b.	KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)	7,75	8,25	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
c.	IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)	4,80	4,50	4,80	4,80	4,80	4,80	4,50	4,50	4,50	4,50	4,80	4,80	4,50
IRAN KINERJA (25%)		20,00	19,38	19,38	19,38	19,38	17,81	18,75	19,38	17,81	19,06	19,38	20,31	18,75
I.	PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)	4,69	4,69	4,38	4,38	4,38	4,38	4,69	4,38	4,38	4,38	4,69	4,69	4,38
II.	KUALITAS PENGUKURAN	10,31	9,69	10,00	10,00	10,00	8,75	9,38	10,00	8,75	10,00	10,00	10,31	10,00
III.	IMPLEMENTASI PENGUKURAN	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,69	4,69	5,00	4,69	4,69	4,69	5,31	4,38
PORAN KINERJA		12,00	11,72	11,72	11,72	11,36	11,18	11,17	11,72	11,17	11,72	11,53	10,35	9,73
I.	PEMENUHAN PELAPORAN	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81
II.	PENYAJIAN INFORMASI KINERJA	5,53	5,53	5,53	5,53	5,18	4,99	5,26	5,53	5,26	5,53	5,63	4,73	4,10
III.	PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA	3,66	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,09	3,38	3,09	3,38	3,09	2,81	2,81
D. EVALUASI KINERJA		7,39	7,14	7,39	6,93	7,43	7,31	7,23	7,60	7,27	7,23	7,23	7,23	6,43
I.	PEMENUHAN EVALUASI	2,00	2,00	2,00	1,58	2,00	1,71	1,88	2,00	1,88	1,88	1,88	1,63	1,75
II.	KUALITAS EVALUASI	3,39	3,39	3,39	3,60	3,68	3,60	3,60	3,60	3,39	3,60	3,60	3,60	3,18
III.	PEMANFAATAN EVALUASI	2,00	1,75	2,00	1,75	1,75	2,00	1,75	2,00	2,00	1,75	1,75	2,00	1,50
ARAN/KINERJA ORGANISASI		13,75	13,54	13,75	13,13	12,50	15,00	14,38	12,50	14,79	12,50	11,25	11,67	15,00
I	KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT)	3,75	3,33	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,33	3,75	2,92	3,75	3,75
II	KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME)	3,75	3,33	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,33	3,75	5,83	3,75	7,50
III	KINERJA LAINNYA	6,25	6,88	6,25	5,63	5,00	7,50	6,88	5,00	8,13	5,00	2,50	4,17	3,75

**REKAPITULASI LEMBAR KRITERIA EVALUASI
(CRITERIA-REFERENCED TEST)
IMPLEMENTASI ATAS AKUNTABILITAS KINERJA
SATUAN KERJA BPS PROVINSI, STIS DAN PUSDIKLAT - TAHUN 2019 (FIELD)**

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BPS PROVINSI SULAWESI SELATAN	BPS PROVINSI MALUKU UTARA	BPS PROVINSI SUMATERA UTARA	BPS PROVINSI JAMBI	BPS PROVINSI BENGKULU	BPS PROVINSI DI BANTEN	BPS PROVINSI SUMATERA BARAT	BPS PROVINSI PAPUA BARAT	BPS PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	BPS PROVINSI GORONTALO	BPS PROVINSI RIAU	BPS PROVINSI JAWA BARAT	BPS PROVINSI SULAWESI TENGAH	BPS PROVINSI KEPULAUAN RIAU	BPS PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
(1)	(2)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
NILAI HASIL EVALUASI		73,53	73,42	73,01	72,92	72,70	72,65	72,58	72,34	72,29	72,17	71,51	71,48	71,39	71,29	71,26
TINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA		BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
CANAAN KINERJA		24,49	24,09	24,59	24,28	25,19	23,79	24,38	23,74	24,49	24,74	23,94	23,94	23,83	23,88	24,38
I.	PERENCANAAN STRATEGIS	7,69	7,29	8,04	7,73	7,94	7,54	7,83	7,19	7,94	7,94	7,69	7,69	7,83	7,33	7,83
a.	PEMENUHAN (2%)	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,83	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,83	1,83	1,83
b.	KUALITAS RENSTRA (5%)	3,75	3,59	3,59	3,91	3,75	3,59	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
c.	IMPLEMENTASI RENSTRA	2,00	1,75	2,50	1,88	2,25	2,00	2,25	1,50	2,25	2,25	2,00	2,00	2,25	1,75	2,25
II.	PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN	16,80	16,80	16,55	16,55	17,25	16,25	16,55	16,55	16,55	16,80	16,25	16,25	16,00	16,55	16,55
a.	PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)	3,75	3,75	3,75	3,75	4,00	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
b.	KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)	8,25	8,25	8,00	8,00	8,75	8,00	8,00	8,00	8,00	8,25	8,00	8,00	7,75	8,00	8,00
c.	IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)	4,80	4,80	4,80	4,80	4,50	4,50	4,80	4,80	4,80	4,80	4,50	4,50	4,50	4,80	4,80
IRAN KINERJA (25%)		18,13	19,06	17,81	18,13	17,19	19,38	19,06	19,06	18,75	17,50	18,75	18,75	19,06	19,06	18,75
I.	PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)	4,69	4,69	4,69	4,38	4,69	5,00	4,38	4,38	4,38	4,69	4,38	4,69	4,38	4,69	4,38
II.	KUALITAS PENGUKURAN	8,75	9,69	8,44	9,69	7,81	9,69	9,69	10,00	9,38	8,13	9,38	9,38	9,69	10,00	9,06
III.	IMPLEMENTASI PENGUKURAN	4,69	4,69	4,69	4,06	4,69	4,69	5,00	4,69	5,00	4,69	5,00	4,69	5,00	4,38	5,31
ORAN KINERJA		11,73	10,55	11,72	10,36	11,26	11,89	11,18	11,81	11,98	11,17	11,72	11,43	10,26	10,08	10,45
I.	PEMENUHAN PELAPORAN	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	3,00	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81
II.	PENYAJIAN INFORMASI KINERJA	5,26	4,64	5,53	4,46	5,36	5,80	4,99	5,63	5,80	5,26	5,53	5,53	4,64	4,46	4,82
III.	PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA	3,66	3,09	3,38	3,09	3,09	3,09	3,38	3,38	3,38	3,09	3,38	3,09	2,81	2,81	2,81
D. EVALUASI KINERJA		7,51	7,23	7,23	5,99	6,35	6,77	6,28	6,06	7,48	7,09	7,10	7,35	6,77	6,81	6,43
I.	PEMENUHAN EVALUASI	1,88	1,88	1,88	1,58	1,88	1,88	1,88	1,58	1,63	1,88	1,75	1,75	1,88	1,71	1,75
II.	KUALITAS EVALUASI	3,88	3,60	3,60	2,91	2,98	3,39	2,91	2,98	3,60	3,47	3,60	3,60	3,39	3,60	3,18
III.	PEMANFAATAN EVALUASI	1,75	1,75	1,75	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	2,25	1,75	1,75	2,00	1,50	1,50	1,50
ARAN/KINERJA ORGANISASI		11,67	12,50	11,67	14,17	12,71	10,83	11,67	11,67	9,58	11,67	10,00	10,00	11,46	11,46	11,25
I	KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT)	3,75	3,33	3,33	3,33	2,92	2,92	2,92	3,33	2,92	3,33	3,33	3,33	2,92	2,92	3,33
II	KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME)	3,75	3,33	3,33	3,33	2,92	2,92	2,92	6,67	5,83	3,33	3,33	3,33	2,92	2,92	5,83
III	KINERJA LAINNYA	4,17	5,83	5,00	7,50	6,88	5,00	5,83	1,67	0,83	5,00	3,33	3,33	5,63	5,63	2,08

**REKAPITULASI LEMBAR KRITERIA EVALUASI
(CRITERIA-REFERENCED TEST)
IMPLEMENTASI ATAS AKUNTABILITAS KINERJA
SATUAN KERJA BPS PROVINSI, STIS DAN PUSDIKLAT - TAHUN 2019 (FIELD)**

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BPS PROVINSI BANGKA BELITUNG	BPS PROVINSI ACEH	Pusdiklat	BPS PROVINSI MALUKU	BPS PROVINSI DKI JAKARTA	BPS PROVINSI PAPUA	STIS	JUMLAH	RATA-RATA PENILAIAN	% TERHADAP BOBOT
(1)	(2)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)
NILAI HASIL EVALUASI		71,12	70,95	70,95	70,49	69,52	66,29	57,61	2.537,29	72,49	72,49%
TINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA		BB	BB	BB	BB	B	B	B			
PERENCANAAN KINERJA		24,23	24,19	23,19	23,99	23,99	23,04	18,18	837,07	23,92	79,72%
I.	PERENCANAAN STRATEGIS	7,68	7,64	6,94	7,44	7,44	7,39	4,13	263,32	7,52	75,24%
a.	PEMENUHAN (2%)	1,83	1,89	1,94	1,94	1,94	1,89	1,50	66,67	1,90	95,24%
b.	KUALITAS RENSTRA (5%)	3,59	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	1,88	128,28	3,67	73,30%
c.	IMPLEMENTASI RENSTRA	2,25	2,00	1,25	1,75	1,75	1,75	0,75	68,38	1,95	65,12%
II.	PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN	16,55	16,55	16,25	16,55	16,55	15,65	14,05	573,75	16,39	81,96%
a.	PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	131,50	3,76	93,93%
b.	KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	7,00	280,25	8,01	80,07%
c.	IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)	4,80	4,80	4,50	4,80	4,80	3,90	3,30	162,00	4,63	77,14%
PEMANTAUAN KINERJA (25%)		17,81	17,19	17,50	17,50	18,13	17,19	15,31	647,82	18,51	74,04%
I.	PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)	4,38	4,38	4,06	4,38	4,69	4,38	4,06	157,19	4,49	89,82%
II.	KUALITAS PENGUKURAN	8,75	8,44	9,38	8,44	8,75	8,44	7,19	325,31	9,29	74,36%
III.	IMPLEMENTASI PENGUKURAN	4,69	4,38	4,06	4,69	4,69	4,38	4,06	165,32	4,72	62,98%
PELAPORAN KINERJA		10,90	11,43	11,43	10,81	11,72	10,26	9,73	390,95	11,17	74,47%
I.	PEMENUHAN PELAPORAN	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	98,63	2,82	93,93%
II.	PENYAJIAN INFORMASI KINERJA	4,99	5,53	5,53	4,91	5,53	4,64	4,10	181,23	5,18	86,30%
III.	PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA	3,09	3,09	3,09	3,09	3,38	2,81	2,81	111,10	3,17	63,48%
D. EVALUASI KINERJA		6,72	6,47	6,74	7,35	7,35	5,80	4,40	241,03	6,89	68,87%
I.	PEMENUHAN EVALUASI	1,42	1,33	1,39	1,75	1,75	1,46	0,89	60,87	1,74	57,97%
II.	KUALITAS EVALUASI	3,81	3,39	3,60	3,60	3,60	2,84	2,01	119,16	3,40	3,40%
III.	PEMANFAATAN EVALUASI	1,50	1,75	1,75	2,00	2,00	1,50	1,50	61,00	1,74	1,74%
HASIL AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI		11,46	11,67	12,08	10,83	8,33	10,00	10,00	420,42	12,01	60,06%
I	KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT)	2,92	3,33	3,33	2,92	3,33	3,33	2,50	116,67	3,33	66,67%
II	KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME)	2,92	3,33	6,67	5,83	3,33	6,67	5,00	144,17	4,12	82,38%
III	KINERJA LAINNYA	5,63	5,00	2,08	2,08	1,67	0,00	2,50	159,58	4,56	45,60%

Lampiran 6

**REKAPITULASI LEMBAR KRITERIA EVALUASI
(CRITERIA-REFERENCED TEST)
IMPLEMENTASI ATAS AKUNTABILITAS KINERJA
SATUAN KERJA BPS KABUPATEN/KOTA - TAHUN 2019 (FIELD)**

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN												
		Kota Samarinda	Kab. Oki	kab. Kutai Kertanegara	Kab. Gunung Mas	Kota Palembang	Kab. Kotawaringin Timur	Kota Palu	Kab. Siak	Kab. Bombana	Kab. Gorontalo	Kota Manado	Kab. Tanjung Jabung Timur
-1	-1	-4	-5	-5	-7	-9	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
HASIL EVALUASI		73,33	68,77	68,73	67,99	67,48	67,42	67,15	67,05	66,62	66,45	66,21	65,95
AKUNTABILITAS KINERJA													
PERENCANAAN KINERJA		23,58	23,18	23,58	21,91	22,63	22,68	24,88	21,81	21,73	22,98	23,58	22,48
I.	PERENCANAAN STRATEGIS	7,33	6,93	7,33	6,66	6,93	7,18	8,63	6,66	6,68	7,33	7,33	7,08
a.	PEMENUHAN (2%)	1,83	1,83	1,83	1,72	1,83	1,83	1,94	1,72	1,83	1,83	1,83	1,83
b.	KUALITAS RENSTRA (5%)	3,75	3,59	3,75	3,44	3,59	3,59	4,69	3,44	3,59	3,75	3,75	3,75
c.	IMPLEMENTASI RENSTRA	1,75	1,50	1,75	1,50	1,50	1,75	2,00	1,50	1,25	1,75	1,75	1,50
II.	PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN	16,25	16,25	16,25	15,25	15,70	15,50	16,25	15,15	15,05	15,65	16,25	15,40
a.	PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
b.	KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)	8,00	8,00	8,00	7,00	7,75	7,25	8,00	7,50	8,00	8,00	8,00	7,75
c.	IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)	4,50	4,50	4,50	4,50	4,20	4,50	4,50	3,90	3,30	3,90	4,50	3,90
PELAKSANAAN KINERJA (25%)		20,00	18,13	18,13	17,81	17,81	17,50	17,81	17,50	17,50	17,50	16,88	16,25
I.	PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,375,00	4,38	4,38	4,38	4,38
II.	KUALITAS PENGUKURAN	10,00	8,75	9,38	8,75	8,44	8,44	8,75	8,44	8,75	8,75	8,13	7,81
III.	IMPLEMENTASI PENGUKURAN	5,00	5,00	4,06	4,69	5,00	4,69	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,06
LAPORAN KINERJA		11,98	10,00	10,62	10,56	10,00	10,29	9,19	10,62	11,09	9,73	9,73	10,62
I.	PEMENUHAN PELAPORAN	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81
II.	PENYAJIAN INFORMASI KINERJA	5,80	4,37	4,99	4,37	4,37	4,10	3,57	4,99	4,91	4,10	4,10	4,99
III.	PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA	3,38	2,81	2,81	3,38	2,81	3,38	2,81	2,81	3,38	2,81	2,81	2,81
EVALUASI KINERJA		6,93	5,38	5,15	5,63	5,38	6,54	6,52	6,29	4,63	4,57	6,02	4,94
I.	PEMENUHAN EVALUASI	2,00	1,39	1,22	1,39	1,39	1,61	1,83	1,61	1,39	1,61	1,61	1,22
II.	KUALITAS EVALUASI	3,18	2,49	2,43	2,49	2,49	3,18	3,18	3,18	2,49	2,22	2,91	2,22
III.	PEMANFAATAN EVALUASI	1,75	1,50	1,50	1,75	1,50	1,75	1,50	1,50	0,75	0,75	1,50	1,50
SARAN/KINERJA ORGANISASI		10,83	12,08	11,25	12,08	11,67	10,42	8,75	10,83	11,67	11,67	10,00	11,67
I	KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT)	3,33	3,75	3,75	3,33	2,92	3,33	2,92	3,33	3,33	3,33	2,92	3,33
II	KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME)	6,67	7,50	7,50	6,67	5,83	6,67	5,00	6,67	6,67	6,67	5,83	6,67
III	KINERJA LAINNYA	0,83	0,83	0,00	2,08	2,92	0,42	0,83	0,83	1,67	1,67	1,25	1,67

**REKAPITULASI LEMBAR KRITERIA EVALUASI
(CRITERIA-REFERENCED TEST)
IMPLEMENTASI ATAS AKUNTABILITAS KINERJA
SATUAN KERJA BPS KABUPATEN/KOTA - TAHUN 2019 (FIELD)**

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN												
		Kab. Bengkulu Utara	Kota Bandar Lampung	Kab. Jombang	Kab. Pahuwato	Kab. Mamasa	Kota Kotamobagu	Kab. Karangasem	Kab. Konawe	Kab. tabanan	Kab. Sanggau	kab. kepulauan meranti	Kab. Pesawaran
-1	-2	-14	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26	-27
HASIL EVALUASI		65,68	65,54	65,48	65,46	65,26	65,08	65,03	64,87	64,70	64,51	64,39	64,37
UNTABILITAS KINERJA													
NCANAAN KINERJA		22,98	21,37	22,96	22,93	23,13	23,58	23,24	21,86	23,44	22,08	22,58	20,43
I.	PERENCANAAN STRATEGIS	7,33	6,72	7,01	7,28	7,18	7,33	7,29	6,66	7,19	6,93	6,93	6,43
a.	PEMENUHAN (2%)	1,83	1,78	1,67	1,78	1,83	1,83	1,94	1,72	1,94	1,83	1,83	1,83
b.	KUALITAS RENSTRA (5%)	3,75	3,44	3,59	3,75	3,59	3,75	3,59	3,44	3,75	3,59	3,59	3,59
c.	IMPLEMENTASI RENSTRA	1,75	1,50	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,50	1,50	1,50	1,50	1,00
II.	PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN	15,65	14,65	15,95	15,65	15,95	16,25	15,95	15,20	16,25	15,15	15,65	14,00
a.	PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
b.	KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)	8,00	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	7,25	8,00	7,50	8,00	7,25
c.	IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)	3,90	3,90	4,20	3,90	4,20	4,50	4,20	4,20	4,50	3,90	3,90	3,00
URAN KINERJA (25%)		15,94	18,13	16,25	16,56	16,25	16,88	15,94	15,31	17,81	16,88	16,25	17,19
I.	PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)	4,38	4,38	3,75	4,06	4,38	4,38	4,06	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38
II.	KUALITAS PENGUKURAN	7,50	9,38	8,13	8,13	8,13	8,13	7,81	7,81	9,06	9,06	7,81	7,81
III.	IMPLEMENTASI PENGUKURAN	4,06	4,38	4,06	4,38	4,38	4,06	4,06	4,38	4,06	4,38	4,06	4,06
APORAN KINERJA		10,26	10,00	10,26	10,53	10,53	10,00	9,73	10,08	9,45	10,62	10,00	9,73
I.	PEMENUHAN PELAPORAN	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81
II.	PENYAJIAN INFORMASI KINERJA	4,64	4,37	4,64	4,91	4,91	4,37	4,10	4,46	4,10	4,99	4,37	4,10
III.	PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,53	2,81	2,81	2,81
ALUASI KINERJA		4,41	5,21	5,59	4,19	4,94	6,29	6,54	5,53	6,08	4,94	5,15	4,94
I.	PEMENUHAN EVALUASI	1,44	1,22	1,39	1,22	1,22	1,61	1,61	1,61	1,61	1,22	1,22	1,22
II.	KUALITAS EVALUASI	2,22	2,49	2,70	2,22	2,22	3,18	3,18	2,43	2,98	2,22	2,43	2,22
III.	PEMANFAATAN EVALUASI	0,75	1,50	1,50	0,75	1,50	1,50	1,75	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
SARAN/KINERJA ORGANISASI		12,08	10,83	10,42	11,25	10,42	8,33	9,58	12,08	7,92	10,00	10,42	12,08
I	KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT)	3,33	2,92	3,33	3,33	2,92	2,50	2,92	3,75	2,92	2,92	3,33	3,33
II	KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME)	6,67	5,83	6,67	6,67	5,83	5,00	5,83	7,50	5,00	5,83	6,67	6,67
III	KINERJA LAINNYA	2,08	2,08	0,42	1,25	1,67	0,83	0,83	0,83	0,00	1,25	0,42	2,08

**REKAPITULASI LEMBAR KRITERIA EVALUASI
(CRITERIA-REFERENCED TEST)
IMPLEMENTASI ATAS AKUNTABILITAS KINERJA
SATUAN KERJA BPS KABUPATEN/KOTA - TAHUN 2019 (FIELD)**

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	Kab. Tanjung Balai	Kab. Wajo	Kota Yogyakarta	Kota Banjarmasin	Kab. Muaro Jambi	Kab. gunung Kidul	Kab. Jayapura	kab. Lombok Barat	Kab. Majalengka	Kab. manggarai Barat	Kab. Sekadau	Kab. Bone
-1	-2	-38	-39	-38	-31	-32	-31	-34	-35	-36	-37	-38	-39
HASIL EVALUASI		64,19	64,09	64,03	64,01	63,85	63,84	63,77	63,76	63,54	63,31	63,26	63,25
UNTABILITAS KINERJA													
NCANAAN KINERJA		21,41	22,39	22,83	22,58	22,98	23,13	22,58	23,73	22,02	22,20	22,08	22,69
I.	PERENCANAAN STRATEGIS	6,61	7,04	7,18	6,93	7,33	7,18	7,18	7,18	6,77	6,50	6,93	7,04
a.	PEMENUHAN (2%)	1,83	1,94	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,72	1,83	1,94
b.	KUALITAS RENSTRA (5%)	3,28	3,59	3,59	3,59	3,75	3,59	3,59	3,59	3,44	3,28	3,59	3,59
c.	IMPLEMENTASI RENSTRA	1,50	1,50	1,75	1,50	1,75	1,75	1,75	1,75	1,50	1,50	1,50	1,50
II.	PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN	14,80	15,35	15,65	15,65	15,65	15,95	15,40	16,55	15,25	15,70	15,15	15,65
a.	PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
b.	KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)	7,75	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	7,75	8,00	7,00	7,75	7,50	8,00
c.	IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)	3,30	3,60	3,90	3,90	3,90	4,20	3,90	4,80	4,50	4,20	3,90	3,90
URAN KINERJA (25%)		16,25	17,50	14,38	16,56	16,56	15,63	16,56	17,19	17,19	15,63	16,88	15,94
I.	PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)	3,13	4,38	4,06	4,06	4,38	4,06	4,38	4,69	4,38	4,38	4,38	4,38
II.	KUALITAS PENGUKURAN	8,44	7,81	7,50	8,13	7,81	8,44	8,44	8,75	8,13	7,50	8,13	7,81
III.	IMPLEMENTASI PENGUKURAN	4,06	4,06	4,38	4,06	4,38	4,38	4,38	3,75	4,38	4,38	4,38	4,06
APORAN KINERJA		10,26	10,62	10,00	10,35	10,62	9,73	9,73	10,35	9,73	10,26	10,62	10,00
I.	PEMENUHAN PELAPORAN	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81
II.	PENYAJIAN INFORMASI KINERJA	4,64	4,99	4,37	4,73	4,99	4,10	4,10	4,73	4,10	4,64	4,99	4,37
III.	PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81
ALUASI KINERJA		5,43	6,08	5,16	4,94	4,94	4,94	5,32	4,57	4,19	5,21	4,94	5,87
I.	PEMENUHAN EVALUASI	1,44	1,61	1,44	1,22	1,22	1,22	1,61	1,61	1,22	1,22	1,22	1,61
II.	KUALITAS EVALUASI	2,49	2,98	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,49	2,22	2,77
III.	PEMANFAATAN EVALUASI	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,75	0,75	1,50	1,50	1,50
SARAN/KINERJA ORGANISASI		10,83	7,50	11,67	9,58	8,75	10,42	9,58	7,92	10,42	10,00	8,75	8,75
I	KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT)	3,33	2,50	3,33	2,92	2,50	3,33	2,92	2,50	2,92	3,33	2,92	2,92
II	KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME)	6,67	5,00	6,67	5,83	5,00	6,67	5,83	5,00	5,83	5,00	5,83	5,83
III	KINERJA LAINNYA	0,83	0,00	1,67	0,83	1,25	0,42	0,83	0,42	1,67	1,67	0,00	0,00

**REKAPITULASI LEMBAR KRITERIA EVALUASI
(CRITERIA-REFERENCED TEST)
IMPLEMENTASI ATAS AKUNTABILITAS KINERJA
SATUAN KERJA BPS KABUPATEN/KOTA - TAHUN 2019 (FIELD)**

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	Kab. Rembang	Kab. Cirebon	Kota Serang	Kota Tangerang	Kota Sabang	Kab. Bengkulu Selatan	Kota Jakarta Barat	Kab. Kediri	Kab. Agam	Kota Bima	Kab. Morotai	Kab. Parigi Moutong
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
HASIL EVALUASI		63,16	63,12	63,08	63,05	62,51	62,49	62,46	62,35	62,29	62,21	61,88	61,35
AKUNTABILITAS KINERJA													
PERENCANAAN KINERJA		22,98	21,67	20,36	22,58	21,20	22,98	22,82	21,44	22,52	23,38	21,53	21,97
I.	PERENCANAAN STRATEGIS	7,03	6,77	6,21	6,93	6,60	7,33	7,12	6,29	6,87	7,33	6,63	6,72
a.	PEMENUHAN (2%)	1,78	1,83	1,83	1,83	1,67	1,83	1,78	1,67	1,78	1,83	1,94	1,78
b.	KUALITAS RENSTRA (5%)	3,75	3,44	3,13	3,59	3,44	3,75	3,59	3,13	3,59	3,75	3,44	3,44
c.	IMPLEMENTASI RENSTRA	1,50	1,50	1,25	1,50	1,50	1,75	1,75	1,50	1,50	1,75	1,25	1,50
II.	PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN	15,95	14,90	14,15	15,65	14,60	15,65	15,70	15,15	15,65	16,05	14,90	15,25
a.	PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
b.	KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)	8,00	7,25	6,50	8,00	7,25	8,00	7,75	7,50	8,00	7,50	7,25	7,00
c.	IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)	4,20	3,90	3,90	3,90	3,60	3,90	4,20	3,90	3,90	4,80	3,90	4,50
PELAKSANAAN KINERJA (25%)		16,56	17,19	17,50	17,19	16,25	15,94	16,88	15,31	14,69	18,13	16,25	18,13
I.	PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,06	4,38	4,06	4,06	4,375,00	4,06	4,38
II.	KUALITAS PENGUKURAN	7,81	7,81	8,13	8,44	7,50	7,50	8,75	7,50	7,19	9,06	9,06	8,44
III.	IMPLEMENTASI PENGUKURAN	4,38	4,38	4,06	4,06	4,38	4,38	4,38	3,75	3,75	4,69	3,75	4,69
PELAPORAN KINERJA		9,46	9,46	8,64	8,91	10,26	10,00	10,35	10,62	10,35	11,25	8,08	9,74
I.	PEMENUHAN PELAPORAN	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81
II.	PENYAJIAN INFORMASI KINERJA	3,84	3,84	3,30	3,57	4,64	4,37	4,73	4,99	4,73	5,63	3,30	3,84
III.	PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA	2,81	2,81	2,53	2,53	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	1,97	3,09
EVALUASI KINERJA		5,83	5,21	5,33	6,03	5,63	4,41	5,74	4,56	4,31	7,39	4,77	6,10
I.	PEMENUHAN EVALUASI	1,83	1,22	1,33	1,83	1,39	1,44	1,61	1,05	1,22	1,75	1,05	1,83
II.	KUALITAS EVALUASI	2,49	2,49	2,49	2,70	2,49	2,22	2,63	2,01	1,59	3,39	2,22	2,77
III.	PEMANFAATAN EVALUASI	1,50	1,50	1,50	1,50	1,75	0,75	1,50	1,50	1,50	2,25	1,50	1,50
SARAN/KINERJA ORGANISASI		8,33	9,58	11,25	8,33	9,17	9,17	6,67	10,42	10,42	8,75	11,25	5,42
I	KINERJA YANG LAPORKAN (OUTPUT)	2,50	2,92	3,33	2,50	2,50	2,92	2,08	3,33	3,33	2,50	3,33	1,67
II	KINERJA YANG LAPORKAN (OUTCOME)	5,00	5,83	6,67	5,00	5,00	5,83	4,17	6,67	6,67	5,00	6,67	3,33
III	KINERJA LAINNYA	0,83	0,83	1,25	0,83	1,67	0,42	0,42	0,42	0,42	1,25	1,25	0,42

**REKAPITULASI LEMBAR KRITERIA EVALUASI
(CRITERIA-REFERENCED TEST)
IMPLEMENTASI ATAS AKUNTABILITAS KINERJA
SATUAN KERJA BPS KABUPATEN/KOTA - TAHUN 2019 (FIELD)**

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN												
		Kab. Belitung	kab. Kep. Seribu	kab. Pasaman	Kota Ternate	Kab. Manggarai Timur	Kab. Pati	Kab. Buru Selatan	Kab. Keerom	Kota Banda Aceh	Kab. Samosir	Kab. Manokwari	Kota Tanjung Pinang
1	2	31	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
HASIL EVALUASI		61,21	61,07	60,81	60,32	60,38	59,37	59,07	58,97	58,35	58,06	57,76	57,36
UNTABILITAS KINERJA													
NCANAAN KINERJA		21,62	22,47	21,81	22,09	20,72	22,98	20,38	21,87	19,90	19,48	19,38	19,51
I.	PERENCANAAN STRATEGIS	6,72	6,82	6,46	7,04	6,07	7,33	5,73	7,07	6,00	4,43	6,93	5,66
a.	PEMENUHAN (2%)	1,78	1,72	1,83	1,94	1,44	1,83	1,67	1,72	1,72	1,56	1,83	1,50
b.	KUALITAS RENSTRA (5%)	3,44	3,59	3,13	3,59	3,13	3,75	2,81	3,59	3,28	1,88	3,59	2,66
c.	IMPLEMENTASI RENSTRA	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,75	1,25	1,75	1,00	1,00	1,50	1,50
II.	PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN	14,90	15,65	15,35	15,05	14,65	15,65	14,65	14,80	13,90	15,05	12,45	13,85
a.	PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,50	3,50
b.	KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)	7,25	8,00	8,00	8,00	7,00	8,00	7,00	7,75	6,25	8,00	6,25	6,75
c.	IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)	3,90	3,90	3,60	3,30	3,90	3,90	3,90	3,30	3,90	3,30	2,70	3,60
URAN KINERJA (25%)		16,88	16,25	15,31	15,31	15,00	15,94	19,06	13,75	16,25	17,19	15,00	15,94
I.	PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)	4,38	4,38	4,06	4,06	4,06	4,38	4,69	4,06	4,06	4,38	4,69	4,06
II.	KUALITAS PENGUKURAN	8,44	8,13	7,81	7,81	7,50	7,50	10,00	7,50	7,81	8,44	7,81	8,44
III.	IMPLEMENTASI PENGUKURAN	4,06	4,38	4,38	4,06	4,06	4,38	4,38	3,75	4,38	4,38	3,75	4,06
APORAN KINERJA		9,45	10,62	9,46	8,08	9,73	9,01	9,19	9,38	10,26	10,00	10,62	9,73
I.	PEMENUHAN PELAPORAN	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,63	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81
II.	PENYAJIAN INFORMASI KINERJA	4,10	4,99	3,84	3,30	4,10	3,57	3,57	3,75	4,64	4,37	4,99	4,10
III.	PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA	2,53	2,81	2,81	1,97	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81
ALUASI KINERJA		4,94	5,07	3,81	4,84	4,94	4,35	4,19	3,56	3,19	5,15	4,85	3,02
I.	PEMENUHAN EVALUASI	1,22	1,61	1,22	1,05	1,22	1,39	1,22	1,22	1,05	1,22	1,61	0,89
II.	KUALITAS EVALUASI	2,22	2,22	1,59	2,28	2,22	2,22	2,22	1,59	1,38	2,43	2,49	1,38
III.	PEMANFAATAN EVALUASI	1,50	1,25	1,00	1,50	1,50	0,75	0,75	0,75	0,75	1,50	0,75	0,75
SARAN/KINERJA ORGANISASI		8,33	6,67	10,42	10,00	10,00	7,08	6,25	10,42	8,75	6,25	7,92	9,17
I	KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT)	2,50	2,08	3,33	2,50	3,33	2,08	2,08	3,33	2,92	2,08	2,50	2,50
II	KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME)	5,00	4,17	6,67	5,00	5,00	4,17	4,17	6,67	5,83	4,17	5,00	5,00
III	KINERJA LAINNYA	0,83	0,42	0,42	2,50	1,67	0,83	0,00	0,42	0,00	0,00	0,42	1,67

**REKAPITULASI LEMBAR KRITERIA EVALUASI
(CRITERIA-REFERENCED TEST)
IMPLEMENTASI ATAS AKUNTABILITAS KINERJA
SATUAN KERJA BPS KABUPATEN/KOTA - TAHUN 2019 (FIELD)**

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	Kab. Bangka Barat	Kab. Teluk Bintuni	Kab. Barito Kuala	Kota Batam	Kab. Mamuju	Kab. Buru	JUMLAH	RATA-RATA PENILAIAN	% TERHADAP BOBOT
-1	-2	-44	-45	-46	-47	-48	-49	-70	-71	(41)
HASIL EVALUASI		56,96	56,87	55,47	54,48	53,36	52,16	4.150,36	62,88	62,88%
AKUNTABILITAS KINERJA										
PERENCANAAN KINERJA		17,54	20,24	18,13	19,56	18,87	19,68	1.447,86	21,94	73,12%
I.	PERENCANAAN STRATEGIS	2,94	5,94	4,83	5,71	5,52	4,78	442,01	6,70	66,97%
a.	PEMENUHAN (2%)	0,94	1,50	1,33	1,56	1,61	1,28	116,17	1,76	88,01%
b.	KUALITAS RENSTRA (5%)	1,25	3,44	2,50	2,66	2,66	2,50	226,09	3,43	68,51%
c.	IMPLEMENTASI RENSTRA	0,75	1,00	1,00	1,50	1,25	1,00	99,75	1,51	50,38%
II.	PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN	14,60	14,30	13,30	13,85	13,35	14,90	1.005,85	15,24	76,20%
a.	PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)	3,75	3,75	3,75	3,50	3,50	3,75	246,50	3,73	93,37%
b.	KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)	7,25	7,25	6,25	6,75	6,25	7,25	499,25	7,56	75,64%
c.	IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)	3,60	3,30	3,30	3,60	3,60	3,90	260,10	3,94	65,68%
PENGUKURAN KINERJA (25%)		17,19	13,13	15,00	15,94	15,63	15,31	1.092,58	16,55	66,22%
I.	PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)	4,38	4,38	4,06	4,06	4,06	4,38	273,46	4,14	82,87%
II.	KUALITAS PENGUKURAN	8,13	6,25	7,81	8,44	7,81	7,50	540,31	8,19	65,49%
III.	IMPLEMENTASI PENGUKURAN	4,38	4,38	4,06	4,06	3,75	3,75	280,31	4,25	56,63%
PELAPORAN KINERJA		9,21	9,42	9,73	8,04	8,63	7,29	652,83	9,89	65,94%
I.	PEMENUHAN PELAPORAN	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,06	184,69	2,80	93,28%
II.	PENYAJIAN INFORMASI KINERJA	3,30	4,64	4,10	4,10	3,57	2,41	285,61	4,33	72,12%
III.	PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA	3,09	1,97	2,81	1,13	2,25	2,81	182,53	2,77	55,31%
EVALUASI KINERJA		5,10	3,66	4,27	3,02	3,98	4,88	335,46	5,08	50,83%
I.	PEMENUHAN EVALUASI	1,39	1,39	1,05	0,89	1,22	0,75	90,61	1,37	45,76%
II.	KUALITAS EVALUASI	2,22	1,53	2,22	1,38	2,01	2,63	157,10	2,38	2,38%
III.	PEMANFAATAN EVALUASI	1,50	0,75	1,00	0,75	0,75	1,50	87,75	1,33	1,33%
SARAN/KINERJA ORGANISASI		7,92	10,42	8,33	7,92	6,25	5,00	628,33	9,52	47,60%
I	KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT)	2,50	3,33	2,50	2,50	2,08	1,67	191,25	2,90	57,95%
II	KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME)	5,00	6,67	5,00	5,00	4,17	3,33	377,50	5,72	114,39%
III	KINERJA LAINNYA	0,42	0,42	0,83	0,42	0,00	0,00	59,58	0,90	9,03%



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. Dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta-10710
Telp (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax: (021)3857046
Homepage: <http://www.bps.go.id> Email : bpshq@bps.go.id